



**KECENDERUNGAN GLOBAL:
PERGESERAN EKONOMI SOSIALIS
KE ARAH EKONOMI KAPITALIS**

Tesis:

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Bidang Studi Ilmu Filsafat

Oleh:

M. Odjak E. Siagian
3791062010

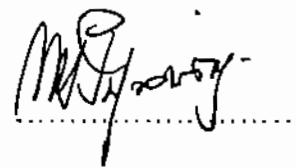
T
25119

Program Studi Ilmu Filsafat
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia
2008

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA
Kecenderungan global by M. Odjak E. Siagian, FIB UI, 2008

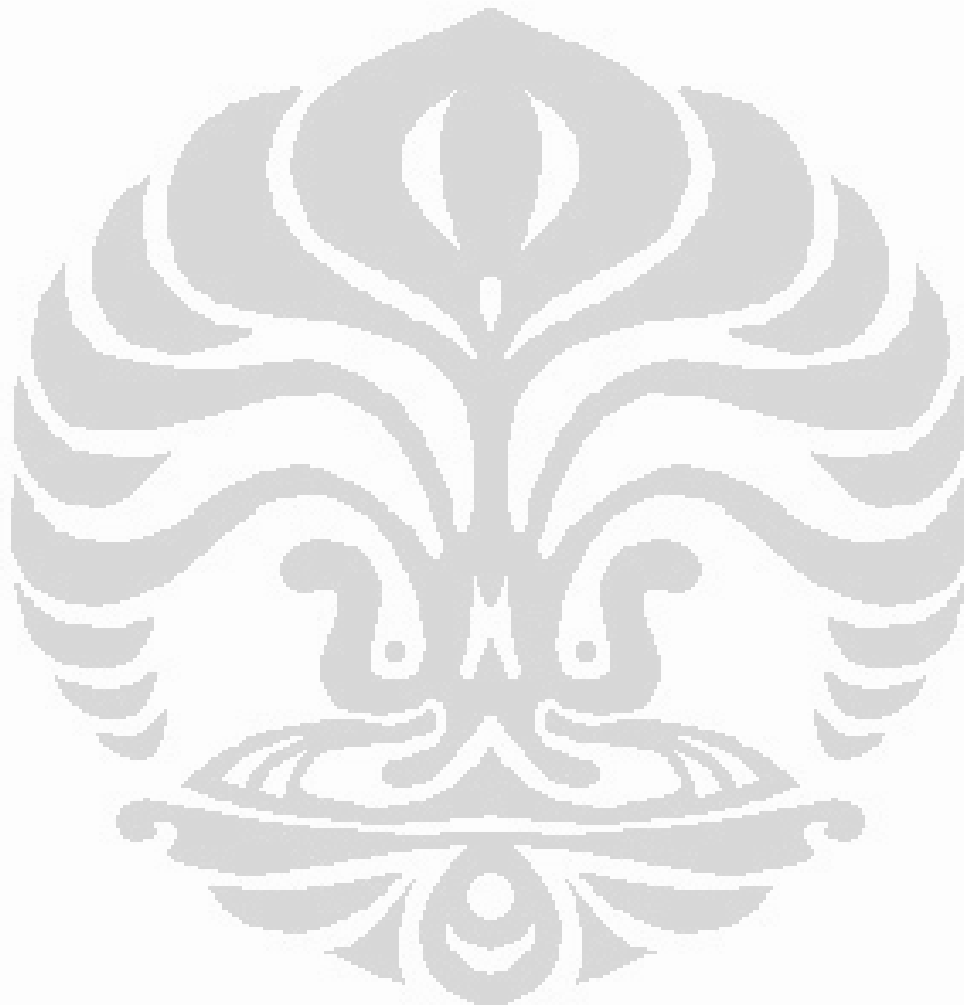
Disetujui Pembimbing Untuk Diuji :

1. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo



2. Dr. Lorens Bagus

Meninggal.....



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diujikan
pada tanggal 29 Agustus 1996

1. Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi
Ketua Penguji

Toeti Heraty Noerhadi

2. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo
Pembimbing I / Penguji

Soerjanto Poespowardojo

3. Dr. Lorens Bagus
Pembimbing II / Penguji

Meninggal

4. Dr. Karlina Supelli, MSc.
Penguji

Karlina Supelli

5. Dr. Talha Bachmid
Panitera

Talha Bachmid

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Ilmu Filsafat

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

Toeti Heraty Noerhadi

Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi
NIP 130.696.595



Bambang Wibawarta
Dr. Bambang Wibawarta
NIP 131 882 265

KATA PENGANTAR

Tujuan saya mengikuti kuliah filsafat di Universitas Indonesia tidak lain ingin memecahkan masalah-masalah kehidupan yang saya hadapi.

Tesis ini saya tulis masih dalam situasi pribadi yang sangat mencekam. Kesibukan saya sehari-hari adalah bertani dan sekaligus ikut menyelenggarakan seminar-seminar dalam lingkup sosial budaya.

Tanpa saya sadari penemuan dan kemajuan saya di bidang pertanian sangat mencengangkan rekan-rekan sekerja. Agaknya berfikir kritis dan radikal merupakan sumbangan paling penting dari pemikiran filsafat yang saya miliki.

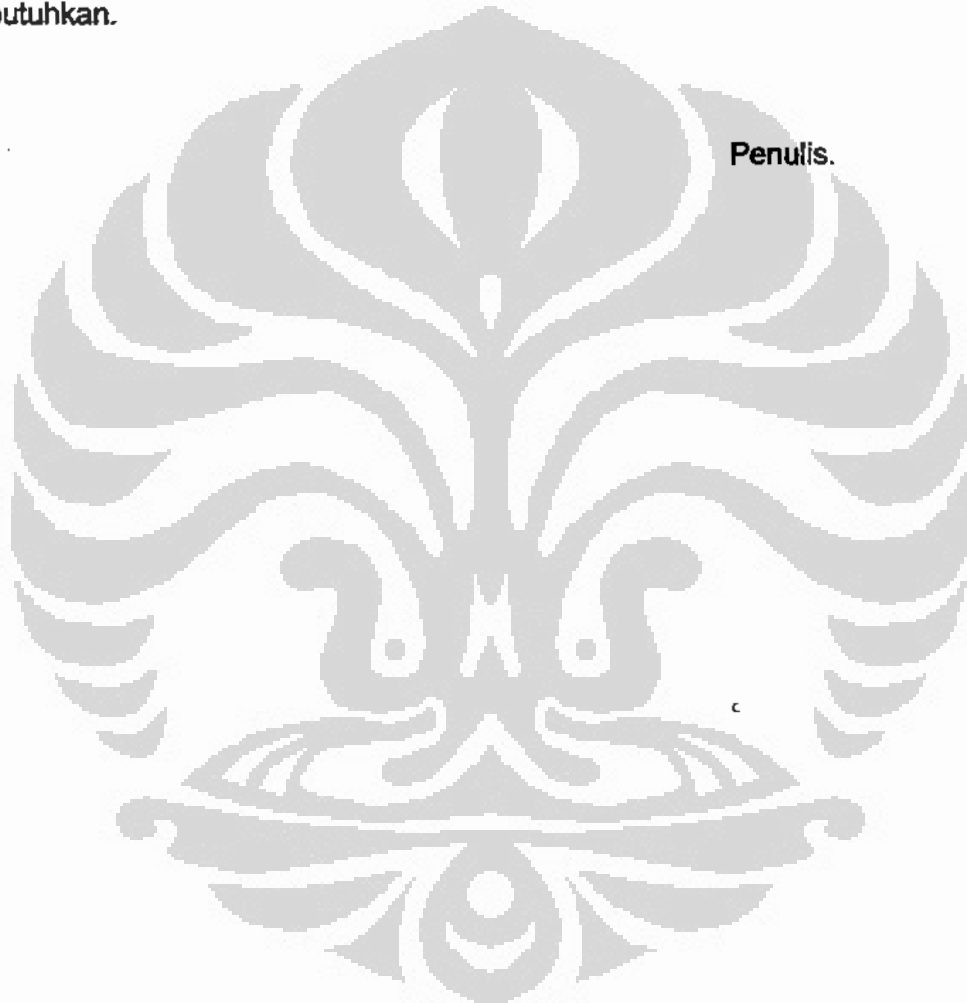
Untuk itu semua, saya berterima kasih kepada Dosen-dosen saya, terutama Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi selaku dosen dan ketua Program Studi Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia. Demikian pula kepada Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo selaku Pembimbing Tesis ini dan kesempatan yang beliau sering berikan kepada saya menjadi asisten beliau mengajar filsafat ilmu pengetahuan di fakultas teknik Universitas Indonesia.

Demikian pula terima kasih saya kepada Dr. Talha Bachmid selaku Sekretaris Program Studi Filsafat yang banyak membantu urusan administrasi.

Akhimya tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan seperguruan, terutama Ibu Ina Sastrowardoyo yang selalu bersedia menjadi rekan diskusi.

Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca yang membutuhkan.

Penulis.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

i

BAB I. Pendahuluan

1

- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Uraian Mengenai Ideologi 7
 - 1.2.1. Hakekat dan Fungsi Ideologi 9
- 1.3. Tujuan Tesis 18
- 1.4. Rumusan Masalah 19
- 1.5. Metoda Pembahasan 20
- 1.6. Ikhtisar singkat 21

**BAB II. Ideologi-Ideologi Utama Dunia;
Sebuah Tinjauan Historis terhadap Interaksi
Individu, Negara, dan Masyarakat**

25

- 2.1. Kapitalisme – Liberalisme 25
- 2.2. Sosialisme – Komunisme 48

**BAB III. Ideologi-Ideologi Utama Dunia
dan Sistem Ekonominya**

57

- 3.1. Kapitalisme – Liberalisme 59
- 3.2. Sosialisme – Komunisme 64

**BAB IV. Pancasila dan Sistem Perekonomian
Indonesia; Sebuah Refleksi**


83

- 4.1. Pandangan-pandangan tentang Sistem
Perekonomian Indonesia 90
 - 4.1.1. Sosialisme Indonesia 90
 - 4.1.2. Ekonomi Pancasila 93
- 4.2. Beberapa Pandangan tentang Persoalan
dalam Sistem Perekonomian Indonesia 103
 - A. Beberapa Persoalan 106
 - B. Sektor Negara 108

BAB V. Penutup

- 5.1. Rekapitulasi Tesis 120
- 5.2. Rekomendasi 131

DAFTAR PUSTAKA



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk memberikan suatu gambaran dan memberi penjelasan mengenai fenomena mutakhir pergeseran sistem ekonomi utama di dunia - dari sistem yang bersifat **Sosial - Komunis** ke **Liberal - Kapitalis**. Dengan kata lain, penulis akan mengupas fenomena pergeseran sistem ekonomi utama di dunia, yang diduga berkaitan dengan dasar

ideologisnya, terutama yang berlangsung pada dekade terakhir abad ke XX.

Dalam tinjauan filosofis, fenomena menarik tentang sistem ekonomi ini tentu saja tidak dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah-praxis ilmu ekonomi, melainkan dengan **tinjauan kritis historis** berupa telaah pada tataran kesejarahan dan atas aspek moralitasnya. Untuk itu, beberapa mazhab yang diakui paling berperan dalam pembentukan sistem-sistem ekonomi akan diperbandingkan, yang diantaranya adalah mazhab **Kapitalisme Klasik** yang diprakarsai **Adam Smith** (1723 - 1790) dan mazhab **Sosialisme**-nya **Karl Marx** (1818 - 1883).

Sistem Ekonomi Kapitalistis (beserta semua varian-variannya) berpijak pada dasar-dasar/pokok hasil pemikiran para pemikir yang tergolong dalam mazhab Kapitalisme Klasik yang kemudian diperkaya dengan beberapa pandangan lain yang berasal dari aliran **Merkantilisme**, mazhab **Historismus**, dan juga mazhab **Institusionalisme**.

Tidak hanya pemikiran tentang filsafat, di dalam mazhab-mazhab itu tentunya berkembang pula pemikiran mendasar tentang ilmu ekonomi, termasuk pokok-pokok yang diajukan sebagai *asumsi-asumsi*. Hal-hal semacam itu juga akan disajikan dalam tulisan ini dengan maksud untuk melengkapi/membantu penjelasan atas beberapa masalah. Namun seperti dipahami bersama tentang peran filsafat, tulisan ini hanya akan menyoroti dan melakukan kritik terhadap berbagai *asumsi* yang menjadi dasar pengembangan teori-teori sistem ekonomi.

Secara **tipologis**, sistem perekonomian negara-negara di dunia dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu yang Pertama, sistem perekonomian **kapitalistik** atau **liberalistik**. Seperti dianut oleh negara-negara Barat di antaranya Amerika Serikat. Kedua, sistem perekonomian **sosialistik** yang antara lain banyak dipraktekkan oleh sebagian besar negara-negara Eropa Timur di bawah pengaruh Uni Sovyet. Terkadang sistem ini disebut sebagai sistem perekonomian komunis, terutama di RRC dan USSR. Ketiga, sistem **justapox sosialistik-liberalistik** yang pernah dianut oleh Indonesia, sebagaimana pernah dinyatakan

Presiden Soekarno dalam pidatonya, *To Build A New Order*, di depan Majelis Umum PBB tahun 1961.

Perbedaan mencolok dari ketiga sistem tersebut antara lain terletak pada ide dasar dalam sistem ideologinya terutama mengenai konsepsi tentang Pasar. Sistem perekonomian **kapitalistik** menganut ideologi liberalisme - individualisme dimana perilaku kehidupan pasar diwarnai oleh dominasi hak-hak perseorangan. Hanya dalam pasar seperti itulah akan ditentukan harga barang yang didasarkan atas interaksi penawaran dan permintaan yang (hampir) bebas dari intervensi negara. Sebaliknya, sistem perekonomian **sosialistik** dengan ideologi sosialisme - komunisme berpendapat bahwa pasar bukan ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan dari pelaku-pelaku perorangan melainkan oleh pemerintah atau negara. Dengan kata lain pasar harus dikendalikan oleh pemerintah melalui berbagai bentuk intervensi misalnya, melalui seperangkat peraturan perundang-undangan atau tampilnya perusahaan-perusahaan milik negara sebagai pelaku-pelaku utama.

Ditinjau dari sisi peran negara, jika ideologi kapitalistik beranggapan kesejahteraan dan keadilan akan terwujud apabila negara bertindak/berlaku sebagai pengawas untuk penjaga terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat belaka, maka ideologi sosialisik menuntut adanya peran yang lebih besar dari negara. Pandangan-pandangan sosialisik tidak hanya menolak negara berfungsi sebagai penjaga dan pengawas tetapi menuntut negara menjadi oknum pengendali yang memiliki *privilege* untuk melakukan intervensi atas kepentingan masyarakat dan perseorangan atau pribadi. Kedua ideologi itu, di samping mengandung aspek-aspek positif, juga mengandung aspek-aspek negatif. Aspek positif atau aspek yang baik sajalah yang perlu diterapkan oleh pemimpin negara. Bagi Indonesia aspek-aspek positif tersebut telah pernah disublimasikan dalam ideologi Pancasila (Soekarno 1961).

Apabila dikaitkan dengan kecenderungan global yang berkembang sejak pertengahan 1980-an, terdapat fenomena lain yang menarik dari segi ideologis. Di negara-negara Eropa Timur, sosialisime atau komunisme mengalami kebangkrutan sehingga kini mereka cenderung meninggalkannya dan mulai mengakrabi

ide-ide baru dari ideologi liberalisme. Tentunya tidak dapat disisihkan konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti perubahan sikap negara-negara tersebut, bukan hanya di bidang perekonomian tetapi juga bidang sosial dan politik. Contoh paling jelas adalah pengalaman USSR yang pecah berantakan menjadi negara-negara republik, seperti Republik Rusia, Ukraina dan lain-lain. Dalam bentuk yang tidak terlalu berbeda yang dialami Yugoslavia dan Cekoslovakia perlu diperhatikan terus-menerus pula. Secara khusus RRC yang telah mulai menerima ide-ide liberalisme-individualisme walaupun belum seratus persen menghapus sub-sub sistem perekonomian lama, perlu memperoleh ruang dalam pemikiran-pemikiran kita pula.

Dengan uraian di atas, nampak ada kecenderungan di mana negara-negara penganut sosialisme ternyata menemui jalan buntu dalam membangun sistem perekonomian yang tangguh dan mampu bertahan di tengah ekspansi sistem ekonomi pasar (terutama dengan menguatnya ide pasar bebas). Agar negara tersebut tetap eksis mau tidak mau mereka harus mengadakan perubahan-perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan globalisasi. Dalam kalimat yang berbeda, sistem perekonomian

yang bersifat **sosialistik** tampak kurang menarik lagi dimata banyak penyelenggara kekuasaan negara di dunia.

Dalam situasi tersebut, Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sadar atau tidak sadar juga akan bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan perkembangan yang dialami oleh ideologi lain. Ia tidak mungkin tinggal *soliter* di tengah hiruk-pikuk globalisasi pasar bebas yang sudah mulai menguat pengaruhnya di berbagai penjuru dunia.

1.2. Uraian Mengenai Ideologi

Judul tesis ini menunjukkan peranan atau pengaruh ideologi di dalam sistem ekonomi dunia. Di dalam buku-buku teks dewasa ini, masalah ideologi semakin tidak populer, bahkan dianggap sebagai paham lama yang tidak patut disejajarkan dengan ilmu pengetahuan.

Secara umum, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan-gagasan yang diatur di dalam suatu sistem yang lahir

dari pikiran seorang atau beberapa orang yang ditawarkan kepada suatu kelompok atau masyarakat mengenai bentuk kehidupan kelompok atau masyarakat yang diidamkan. Rumusan ideologi amat banyak dikenal dan perkembangannya sangat tergantung pada sikap pemeluknya. Sebagai suatu ilustrasi, amat menarik untuk dikemukakan peranan ideologi di Korea. Seusai Perang Dunia ke-II, Korea terbagi atas dua negara berkedaulatan, yaitu Republik Sosialis Korea yang terletak di sebelah Utara garis lintang 38° dan Republik Korea Selatan yang terletak di bawah garis lintang itu.

Korea Utara berkembang di bawah ideologi sosialisme dan warganya percaya pada tawaran ideologi ini. Di Selatan, warga Republik Korea juga amat percaya pada isi ideologi pembangunan ekonomi yang ditawarkan. Lepas dari keberhasilan masing-masing masyarakat Korea ini, secara jelas dapat diperhatikan bahwa masyarakat Korea menganggap ideologi sebagai sesuatu yang amat berguna di dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu penulis, beranggapan bahwa masalah ideologi ini perlu dijelaskan terlebih dahulu, agar tesis ini dapat dipahami sebaik-baiknya. Penulis dapat mengemukakan berbagai definisi atau rumusan yang dikutip dari berbagai sumber, akan tetapi dengan pertimbangan yang cukup matang penulis memutuskan untuk mengutip secara keseluruhan, tentunya dengan sedikit perbaikan redaksi atas penjelasan Soerjanto Poespowardojo di dalam terbitan resmi BP-7 Pusat (1991) yang isinya adalah sebagai berikut.

1.2.1. Hakekat dan Fungsi Ideologi

Dengan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya itu seorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Demikian pula ia akan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai perwujudan keseluruhan pengetahuan dan nilai yang dimilikinya. Dengan demikian akan terciptalah baginya suatu dunia kehidupan masyarakat dengan sistem dan struktur sosial yang sesuai dengan orientasi ideologisnya. Namun ini tidak berarti bahwa dunia kehidupan masyarakat semata-mata merupakan manifestasi ideologi, sebagaimana dapat dikemukakan menurut alam pikiran Hegel. Karena ideologi bukan suatu yang berdiri sendiri lepas dari kenyataan hidup masyarakat. Ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat dan karena itu dalam arti tertentu merupakan manifestasi kenyataan sosial juga.

Pada hakekatnya ideologi tidak lain adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengambil jarak terhadap dunia kehidupannya. Antara keduanya, yaitu ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi, hubungan dialektis, sehingga berlangsung pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang di satu pihak memacu ideologi makin realistis sedang di lain pihak mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal.

Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, namun juga membentuk masyarakat yang berhak menuju cita-cita, bersama dengan demikian terlihatlah bahwa ideologi bukanlah sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu kenyataan. Ideologi adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi penganutnya untuk mengujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang berarti semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakan ide-ide di dalam ideologi tersebut. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan-ketentuan *normatif* yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Fungsi Ideologi

Dari uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan:

1. Struktur *kognitif*, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.

2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk mamahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya, sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Soerjanto juga membedakan ideologi dari pandangan hidup. Sebetulnya pandangan hidup katanya, juga memberikan orientasi dalam kehidupan manusia. Padangan hidup tumbuh bersama kebudayaan dalam bentuk yang sederhana dan umum. Masyarakat primitif pun mempunyai semacam pandangan hidup yang menunjukkan tatanan bagi segala sesuatu yang berada dalam jagat raya.

Namun dibandingkan dengan ideologi, pandangan hidup memberikan orientasi secara global dan tidak bersifat eksplisit. Ideologi pada pihak lain berkembang terutama dalam abad ke-19 dimana dibutuhkan orientasi yang jelas dan terjabarkan ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat yang tengah mengalami proses kemajuan/perubahan. Sejak revolusi industri dan revolusi Perancis pada tahun 1789, terjadi perubahan dan pembaruan di segala bidang menuju sistem yang baru. Dari pengalaman atas terjadi perselisihan dan pertentangan sosial yang memungkinkan munculnya ideologi-ideologi baru. Sebagai reaksi terhadap sistem monarki yang feodal dan absolut, timbullah pandangan-pandangan liberal yang menginginkan sistem sosial yang demokratis dan terbuka.

Sebagai reaksi terhadap eksploitasi dalam kapitalisme, timbullah orientasi yang ingin mengujudkan masyarakat adil tanpa kelas, dan sebagai reaksi terhadap kolonialisme yang imperialistis, tumbuhlah perjuangan yang didorong paham bagi setiap individu dan masyarakat nasionalisme yang mendambakan kemerdekaan dan keadilan.

Menurut Soerjanto, ideologi bila dibandingkan dengan pandangan hidup, memberikan orientasi yang lebih eksplisit dan lebih terarah bagi keseluruhan sistem masyarakat dalam berbagai aspeknya, yang dilakukan dengan cara dan penjelasan yang lebih logis dan sistematis. Oleh karena itu pula ideologi lebih siap menghadapi jaman modern dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Walaupun begitu dapat saja terjadi bahwa pandangan hidup menjadi ideologi, jika dilakukan "eskplisitasi" lebih lanjut dari prinsip-prinsip dasar ke dalam kondisi hidup modern dan pembersihan dari unsur-unsur magis, sehingga akhirnya mampu memberikan orientasi yang jelas dalam mencapai tujuan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Kalaupun ideologi membicarakan nilai-nilai dan makna yang mendasarkan dalam kehidupan manusia, bahkan memberikan pegangan hidup juga, namun ia harus dibedakan dari agama. Agama adalah sitem kepercayaan yang mengakui bahwa jagat raya dan dunia seisinya adalah ciptaan Tuhan, dan kehidupan yang fana ini akan dilanjutkan dengan kehidupan yang baka. Untuk mengabdikan kepada Tuhan sebagai pencipta dan mendapatkan kebahagiaan kekal dalam alam baka itu, agama

memberikan bimbingan untuk hidup baik menurut ajaran yang diterima melalui wahyu ilahi. Manusia menerima ajaran-ajaran itu dengan sikap percaya serta *iman* yang mengandung harapan.

Ideologi bukanlah agama karena pedoman bermasyarakat yang diberikan olehnya ditujukan secara langsung untuk kehidupan di dunia ini, walaupun secara tidak langsung dapat mengkaitkan atau mengacu kepada kehidupan yang akan datang. Isi yang dikemukakan dalam ideologi bukanlah wahyu atau wangsit dari Tuhan, melainkan hasil pikiran manusia berkat daya refleksinya yang tajam mengenai segala sesuatu dan segala kejadian di sekelilingnya, dan daya kreasinya dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi serta menghadapi hari depan. Oleh karena itu sikap seseorang terhadap ideologinya bukanlah sikap percaya terhadap suatu ajaran, melainkan lebih pada sikap natural terhadap prinsip-prinsip hidup yang dikendalikan oleh akal budi.

Dengan demikian wajarlah bahwa seseorang akan bersikap *rasional*, bahkan kritis terhadap ideologi yang diterimanya. Sikap

yang demikian itu sehat dan bahkan diperlukan karena membuat ideologi menjadi bersifat terbuka dan dinamis.

Di lain pihak perlu disadari bahwa dalam sejarah ilmu politik, agama ternyata dapat menjadi ideologi, artinya menjadi dasar hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini mempunyai konsekuensi-konsekuensi tersendiri, antara lain mendorong sifat-sifat eksklusif, karena memberlakukan satu agama dari satu bagian masyarakat sebagai prinsip ideologi yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Hal itu jelas sulit dilaksanakan dalam masyarakat modern yang kian majemuk dan mengenal berbagai diferensiasi. Lagi pula dengan turunnya posisi agama menjadi ideologi, maka agama lalu terdorong masuk ke kancah politik, sehingga akhirnya ideologi-agama tersebut langsung atau tidak langsung harus siap untuk ditanggapi secara rasional dan harus sanggup menjadi bahan kritik-kritik sosial. Hal itu tentunya akan mendatangkan kesulitan baru bagi masyarakat yang memiliki ideologi-agama tersebut karena harus menyesuaikannya dengan kondisi kehidupan modern yang serba terbuka dan rasional.

Dapatkah ideologi sekarang disamakan dengan filsafat?

Ideologi berbeda dengan filsafat. Ideologi memang mengandung nilai dan pengetahuan filosofis, tetapi berlaku sebagai keyakinan yang normatif. Sedangkan filsafat adalah rangkaian pengetahuan ilmiah yang disusun secara sistematis tentang kenyataan-kenyataan hidup, termasuk kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu filsafat bersifat bebas dan tidak normatif, artinya ia bergerak menurut hukum-hukum logika dan ilmiah.

Dalam filsafat terungkap pemikiran-pemikiran reflektif yang harus ditanggapi bukan dengan sikap dogmatis, melainkan dengan sikap yang kritis rasional. Dengan demikian filsafat selalu terbuka terhadap kritikan dan tidak bersifat eksklusif. Oleh karena itu filsafat sangat berguna bagi ideologi dan proses penjabaran ideologis, sebab melalui pendekatan filosofislah dikaji secara mendasar hal-hal yang berkaitan dengan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Refleksi filosofis itulah yang membuat ideologi tetap terbuka, tidak eksklusif, dan tidak totaliter, bahkan sebaliknya menjadi dinamis dan tanggap

terhadap perubahan dan kemajuan, melalui interpretasi-interpretasinya yang objektif, rasional dan ilmiah. Dengan demikian ideologi menjadi tetap relevan.

1.3. Tujuan Tesis:

1. Telaah ini mencoba memperlihatkan keterkaitan antara ideologi dan sistem ekonomi. Ideologi-ideologi ternyata terbukti mempunyai pengaruh kuat atas bagaimana sistem ekonomi bekerja dalam suatu negara.
2. Menelusuri perkembangan kontemporer ideologi-ideologi dalam kaitannya dengan sistem ekonomi. Dalam perkembangannya, selain berpengaruh terhadap sistem ekonomi, wajah dari perkembangan itu melahirkan berbagai masalah yang sebelumnya tak terpikirkan.
3. Mencoba melihat Ekonomi Pancasila (dan perjalanan sejarahnya) dalam kaitannya dengan perkembangan mutakhir ideologi-ideologi utama dunia (*sosialisme -komunisme, kapitalisme - sosialisme*). Secara khusus unsur-unsur dan

badan usaha yang diwadahi oleh Ekonomi Pancasila dicoba diperlihatkan dan diberi beberapa catatan kritis pula.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bila kita melihat bagaimana suatu mekanisme ekonomi bekerja dalam suatu negara, ternyata unsur atau aspek ideologi mempunyai peran yang sangat menentukan. Dalam sejarah dapat kita lihat dengan jelas bahwa perkembangan ideologi mulai dari liberalisme dan kapitalisme hingga ke sosialisme dan komunisme ternyata bukan hanya berurusan dengan bagaimana suatu masyarakat disusun, melainkan juga menjelaskan/menentukan persoalan seperti bagaimana bentuk pertukaran barang dilakukan dalam suatu masyarakat. Dari sinilah kemudian, dalam perkembangan terakhirnya, ada ideologi yang mengalami keruntuhan dan ada yang dianggap "menang". Perkembangan itu mau tidak mau merembes ke persoalan ekonomi dan melahirkan berbagai masalah yang harus dihadapi oleh semua negara. Untuk konteks Indonesia, bagaimana Pancasila berhadapan dengan perubahan dan

perkembangan ideologi di atas termasuk sebagai masalah yang akan ditelaah.

2. Ringkasnya, apa yang menjadi masalah dalam telaah ini adalah bagaimana ideologi-ideologi berkaitan dengan sistem ekonomi, dan bagaimana perkembangan terakhirnya, serta bagaimana Pancasila dalam sistem ekonominya berhadapan dengan perkembangan ideologi tersebut.

1.5. Metoda Pembahasan

Telaah ini akan menggunakan tinjauan filosofis dan historis atas ideologi-ideologi dan perkembangannya. Tinjauan historis di sini dimaksudkan tidak lain hanya sebagai sekedar bahan yang dapat memperkuat tugas utama telaah ini yakni: melakukan **tinjauan filosofis**. Dengan kata lain, bahan sejarah hanya sebagai pelengkap tanpa pretensi hendak membuat suatu penyimpulan atas data-data sejarah.

Untuk memenuhi metode di atas, maka studi kepustakaan menjadi hal yang penting dalam telaah ini. Pustaka yang dapat menjelaskan persoalan di atas akan dicoba dikaji, baik yang berasal dari luar maupun dari Indonesia.

1.6. Ikhtisar Singkat

Seluruh isi dari tesis ini akan terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan apa yang menjadi latar belakang, pokok masalah, tujuan tesis, metoda pembahasan, dan ikhtisar ini. Bab ini tidak lain hendak memberi suatu pengantar yang dapat memperlihatkan bagaimana telaah akan diuraikan.

- Pada Bab kedua akan diulas bagaimana ideologi-ideologi utama dunia bekerja dan berkembang sepanjang perjalanan sejarahnya dalam suatu masyarakat. Kaitan antara individu, negara dan masyarakat akan menjadi salah satu bagian penting dalam bab ini khususnya dalam kaitannya dengan

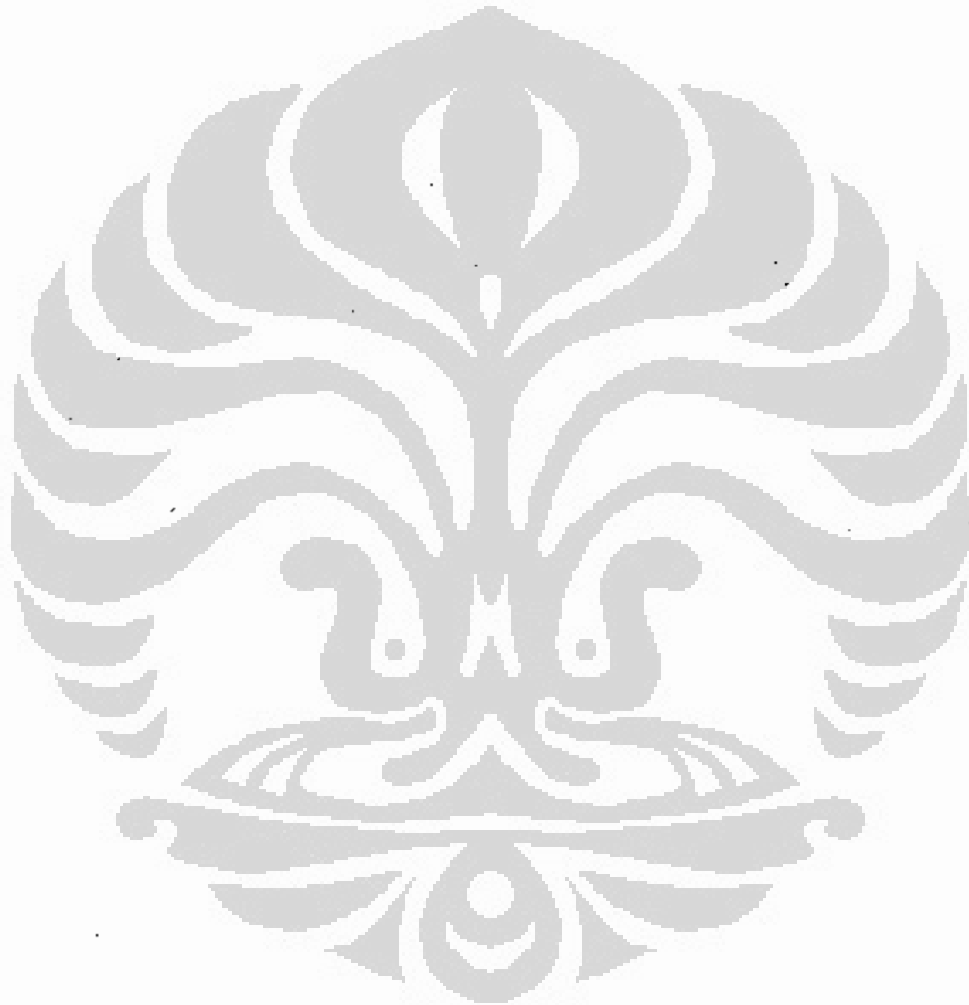
ideologi-ideologi utama dunia seperti kapitalisme dan liberalisme, serta sosialisme dan komunisme.

- Pada Bab ketiga, akan dijelaskan bagaimana pengaruh ideologi tersebut di atas berlaku sistem ekonomi. Sistem ekonomi dengan segala unsur-unsurnya terlihat jelas akan dipengaruhi oleh ciri ideologi yang menjadi asumsi dasarnya. Sedikit agak berbeda dengan pandangan Marx, yang semata-mata melihat bahwa **struktur ekonomi** sebagai penentu dari **bentuk ekonomi**, pada bab ini akan dicoba dilihat bahwa ideologi ternyata juga mempunyai pengaruh terhadap sistem dan akhirnya struktur ekonomi. Dalam bab ini penulis banyak menggunakan materi yang dijumpai dalam buku DR. Winardi (Kapitalisme versus Sosialisme) karena meskipun secara khusus berbicara mengenai Ekonomi Makro namun naskah tersebut memberi gambaran tentang isme-isme relevan dan memuat pandangan-pandangan filsafat yang merupakan sublimasi dari kenyataan-kenyataan perilaku ekonomi.
- Bab empat bertujuan untuk mengkontekstualisasi telaah ini. Bab Ini akan menguraikan refleksi penulis terhadap pengaruh

ideologi terhadap sistem ekonomi, untuk itu penulis mengangkat pula pandangan dua tokoh ekonomi Indonesia sebagai upaya memperoleh kejelasan tentang Pancasila dan Sistem Ekonomi Indonesia. Beberapa persoalan menarik menyangkut Ekonomi Indonesia hingga akhir-akhir ini, juga akan menjadi bahan refleksi untuk dijelaskan. Selain itu bagaimana bentuk dan wujud nyata ekonomi Pancasila tersebut bekerja dalam masyarakat, wadah atau badan usaha ekonomi di Indonesia: Koperasi, BUMN, dan swasta, akan diuraikan dan dicoba dilihat efektifitasnya berhadapan dengan masalah-masalah kontemporer dalam globalisasi ekonomi akhir-akhir ini.

- Sebagai penutup, bab terakhir akan berisi suatu rekapitulasi tesis agar dapat terlihat kembali struktur isi dari tesis. Dan tentu saja, agar telaah ini mempunyai arti penting bagi kita, maka akan dicoba diberikan beberapa rekomendasi yang kiranya bermanfaat dalam pengembangan sistem ekonomi Pancasila. Tentu saja ada dengan syarat/asumsi, *good will* dari para penyelenggara negara pengambil kebijakan politik

dan kerja keras dari para cendekiawan dalam pengembangannya.





BAB II.

IDEOLOGI-IDEOLOGI UTAMA DUNIA SEBUAH TINJAUAN HISTORIS

2.1. Kapitalisme-Liberalisme

Adam Smith (1723-1790) yang dipandang sebagai filosof utama ideologi ini adalah seorang guru besar dalam ilmu filsafat di **Universitas Edinburgh** yang pada mulanya menaruh perhatian besar pada bidang logika dan etika, namun kemudian ia lebih banyak menekuni masalah-masalah ekonomi.

Pandangan-pandangannya tentang masalah ekonomi (dan politik) bersumber pada filsafat moral tentang **tata susunan masyarakat berdasarkan hukum alam** (*the natural order of things*). "Motivasi ekonomi manusia sangat erat kaitannya dengan peran dan kepentingan individu," demikian salah satu pernyataan pentingnya.

Dalam pandangan Adam Smith, di dalam bukunya "The Wealth of Nations", perilaku manusia *secara alamiah* didorong oleh enam pertimbangan motivasi: kepentingan diri sendiri; unsur simpati dalam hubungan antara sesama manusia (dari satu individu terhadap individu-individu lain); hasrat untuk berkelakuan secara bebas; kecenderungan dalam perilaku - untuk menjaga sikap sopan santun; kebiasaan untuk bekerja; dan kecenderungan dalam dunia modern untuk melakukan transaksi jual-beli barang.

Buku *The Wealth of Nations* tersebut mempunyai pengaruh yang hanya bisa diimbangi oleh Das Kapitalnya Karl Marx di kemudian hari. Banyak pakar ekonomi dunia beranggapan bahwa buku ini merupakan salah satu karya ilmiah paling sukses yang pernah diterbitkan sampai sekarang.

Adam Smith juga dikenal luas sebagai lawan dari **Merkantilisme** (paham yang terbentuk melalui suatu politik ekonomi pada abad ke-16), yang salah satu pandangannya mengatakan, kekayaan suatu bangsa terletak pada banyaknya logam mulia yang dimiliki. Pandangan itu membawa Merkantilisme sampai pada gagasan untuk memaksa terjadinya ekspor barang sambil menghindarkan impor sebisa mungkin (kecuali impor barang mentah). Karena melalui ekspor berarti uang mengalir masuk dalam bentuk emas dan perak.

Secara kasar dapat dikatakan bahwa Merkantilisme tidak banyak mengikuti teori tertentu; ia lebih banyak berdiri atas kumpulan peraturan yang punya sasaran memperkuat keuangan negara, atau lebih tepat lagi ; memperkuat keuangan pengusaha absolut yang sedang berkuasa. Hal ini diperkuat dengan didirikannya manufaktur milik negara atau manufaktur dan kongsi dagang yang mendapat bantuan dari negara, yang hasilnya digunakan untuk biaya perang dan kemewahan istana-istana. Bentuk ekonomi kapitalisme awal inilah yang mencapai puncaknya di bawah raja Prancis Louis ke-XIV yang disebut Raja Matahari (1638-1715) yang terkenal dengan semboyannya "Negara adalah

Aku". Paham inilah yang berkembang secara bertahap hingga menjadi bentuk ekonomi modern yang kemudian banyak diwarnai oleh Adam Smith.

Sikap "*Laissez faire*" (biarkan saja), yang berlawanan dengan titik tolak pemikiran Merkantilisme (dan kemudian dengan sosialisme), tidak dikarang begitu saja oleh Adam Smith, karena memiliki alasan-alasan logis. Adam Smith melihat bahwa dalam ekonomi pasar bebas, terutama bekerja dua prinsip. Kedua prinsip ini, adalah **kebebasan** dan **kebutuhan**, dua hal yang sepintas lalu kelihatan tidak saling berhubungan. Kedua prinsip ini baru akan bertemu jika pengertian kebebasan didefinisikan sebagai tidak adanya halangan, seperti air yang terus bergerak selama tidak dihalangi oleh bendungan - karena ia harus mengalir turun mengikuti hukum (keharusan) gaya berat.

Seperti air itulah ekonomi pasar yang dimaksudkan oleh Adam Smith. Ekonomi akan berkembang dengan bebas jika negara tidak menghalanginya dengan memberi batasan-batasan. Namun dalam perkembangannya kemudian, ekonomi yang bebas itu *akhirnya* harus mematuhi hukum-hukum ekonomi juga, yang

“dilahirkannya” sendiri semisal hukum persaingan yang mengatur harga.

Ketika Smith memasuki diskusi tentang hal di atas, diantara pemikir-pemikir modern saat itu, berlaku pendapat bahwa setiap manusia sudah sewajarnya punya hak akan kebahagiaan. Sewajarnya dalam arti “menurut kodrat Tuhan”. Sifat mementingkan diri sendiri yang dikodratkan Tuhan dalam diri manusia adalah sesuatu yang baik. Hanya dalam beberapa kekecualian saja sifat ini berkembang menjadi buruk. Sifat ini pada dasarnya baik, karena menjamin setiap keinginan dan tuntutan yang sudah “sewajarnya” dengan materi dan perbaikan hidup.

Pemikiran umum yang telah berlaku itulah yang ditempa oleh Smith dalam bidang ekonomi. Smith memuji sifat mementingkan diri sendiri sebagai penggerak segala kegiatan ekonomi, antara lain ia menulis: “Kita bisa makan bukan karena kebaikan hati si tukang warung, penjaja es atau si tukang daging melainkan karena sifat mementingkan diri sendiri yang ada di dalam diri

mereka. "Kita bukan mengharapkan cinta mereka terhadap dirinya sendiri" lanjut Adam Smith.

Dari pandangan itu, Adam Smith membuat sebuah tesis yang mengatakan, bahwa kegiatan demi kepentingan diri sendiri yang tak terhitung jumlahnya itulah yang mempertahankan jalannya ekonomi. Sikap Adam Smith ini dapat disejajarkan dengan pandangan John Locke.

"Manusia merasa wajib untuk memenuhi keperluan-keperluannya, jadi pertama-tama ia adalah makhluk ekonomi" adalah sepenuhnya sesuai dengan pendapat-pendapat Locke yang empiristis bahwa manusia belajar dari pengalaman. Atas dasar pengalaman itulah, melalui suatu proses coba-coba ia dapat membantu mengorganisir dan membangun masyarakat. Maka misalnya ia dapat belajar bahwa adalah tidak rasional untuk memenuhi segala keperluan dengan seketika. Dengan menunda pemuasannya maka dari uang yang dapat ditabung dan investasi-investasi dimungkinkan. Dengan cara demikian dapat dilakukan pekerjaan jangka panjang secara efisien, sehingga dapat dicapai hasil-hasil yang lebih baik.

Selain itu karena manusia dapat belajar dari pengalaman, maka mereka tidak perlu hidup di bawah paksaan. Mereka mengetahui atau belajar mengenali kepentingan-kepentingan mereka, dan dapat bersepakat dengan orang-orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Orang-orang mengatur dirinya sendiri dalam ikatan mereka satu sama lain. Dalam pandangan Locke, tertib masyarakat terjadi karena **interaksi bebas**. Karena interaksi itu terjadilah pula lembaga-lembaga untuk, misalnya mengatur hubungan-hubungan hak milik, mengatur kelakuan dan juga kebebasan. Pendapat **Hobbes** bahwa kebebasan akan mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan, dengan demikian ditolak oleh Locke.

Pun ide-ide mengenai kontrak sosial memperoleh artinya dari Locke. Kontrak bukan saja menjamin keamanan warga negara, melainkan terutama hak-hak pemikirannya. Dalam kontrak itu kedaulatan pribadi tidak dilepaskan. Setiap warga tetap merupakan tuan tanah dirinya sendiri. Dengan demikian maka negara yang hak-hidupnya sebagai negara diakui-diberi tempat yang berbeda. Negara mendapatkan kewenangannya dari hamba-hambanya tetapi diberi batas-batasnya, yaitu bilamana

negara itu tidak lagi memperoleh persetujuan dari hamba-hambanya itu. Kekuasaan berasal dari masyarakat dan dapat diminta kembali. Negara harus menjamin kebebasan dalam lingkungan pribadi, dan terus dianggap sebagai lembaga kepercayaan dalam soal hak milik pribadi.

Guna menjamin agar negara tidak melanggar kewenangannya, maka Locke mengusulkan pemisahan antara pembuat undang-undang dan kekuasaan pelaksanaan. Yang terakhir ini ada pada raja, tetapi ia terikat oleh kekuasaan pembuat undang-undang yang mandiri yang dimiliki oleh parlemen. Dengan cara ini kesewenang-wenangan dapat dicegah.

Sebagai orang *liberal* yang jujur, Locke sangat menghormati hak milik pribadi. Dalam keadaan alamiah manusia sudah memiliki hak milik. Menurut pendapatnya, Tuhan telah memberikan dunia ini kepada manusia untuk membuatnya produktif. Manusia, sebagai makhluk yang mempunyai keperluan-keperluan, harus berusaha untuk meningkatkan miliknya, sebab pemuasan keperluan-keperluan itu tergantung pada usaha ini. Mereka yang lebih berusaha daripada orang lain dengan sendirinya akan dapat

memperbesar hak miliknya secara sah. Dengan cara ini, Locke membenarkan *ketidaksamaan* di dalam soal milik.

Di dalam masyarakatpun, masing-masing orang tidak sama. Terdapat dua golongan: yang satu terdiri atas kaum pemilik tanah dan modal. Yang lainnya terdiri atas orang-orang yang hanya memiliki tenaga kerja. Menurut Locke ketidaksamaan ini harus berjalan terus di dalam penataan pemerintahan negara. Hanya golongan yang disebut pertamalah yang dapat mengambil keputusan-keputusan politik yang sah. Namun semuanya memiliki hak yang sama atas perlindungan milik mereka.*

Kegiatan-kegiatan itu tidak akan membawa kekacauan dalam ekonomi, malah membawa pada aturan yang sudah "sewajarnya" (seperti yang dikehendaki Tuhan). Kegiatan-kegiatan itu semua dijamin oleh aturan-aturan logis yang berasal dari kebijaksanaan Tuhan dan yang menurut Smith menguasai dunia berikut ekonomi pasar bebasnya, bagaikan sebuah tangan tak terlihat yang mengatur hukum mencakup produksi, penjualan dan pembelian barang. Siapa yang melanggarnya, misalnya siapa yang melanggar hukum penawaran dan permintaan dengan jalan

memasukkan bir lebih banyak ke pasar daripada yang diminta, harus memperhitungkan akibat buruknya, dan kemungkinan yang paling buruk lagi, dia akan bangkrut. Menurut Adam Smith si pedagang akan terpaksa menawarkan apa yang diinginkan oleh pembeli dan apa yang ia tawarkan harus lebih baik dari produksi saingannya.

Walaupun tingkat hidup dalam masa Smith tidak menjadi semakin buruk dan bahkan Inggris makin kaya karena perdagangannya yang luas keseluruh dunia serta koloni-koloninya di India dan Amerika Utara, namun sebagian besar rakyat Inggris masih harus berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Sekitar tahun 1760, yaitu di awal *Revolusi Industri*, di Inggris, termasuk Skotlandia, hidup 7 (tujuh) juta manusia yang jumlahnya kemudian semakin cepat meningkat. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki tidak lebih daripada sebuah tempat tidur, meja, dan tempat membuang ludah.

Satu setengah juta manusia sering tidak punya kerja, mereka merupakan *tentara yang tidak berguna*. Umur rata-rata hanya

mencapai 35 tahun akibat tingginya angka kematian anak-anak, kurangnya kebersihan, dan buruknya jaminan kesehatan.

Di pertambangan wanita harus menarik kereta batu bara, dan sering terjadi bahwa mereka sampai melahirkan bayinya di sana. Anak-anak kecil mengemis atau oleh badan-badan sosial dimasukkan ke pabrik dimana dengan "jari-jari kecil mereka yang lincah" dipaksa harus bekerja selama 16 jam sehari.

Kebanyakan kaum kapitalis akan senang kalau harga bahan makanan naik, karena dengan demikian si miskin dapat dipaksa untuk bekerja lebih banyak lagi. Ditengah situasi tersebut, ternyata apa yang dituntut Adam Smith pada negara dan kaum kapitalis, yaitu pendidikan bagi rakyat, tidak mereka lakukan. Yang berlaku ternyata hanya rumus: *kemiskinan + ketidaktahuan = kepuasan (kaum kapitalis)*.

Penyebab utama kesengsaraan ini adalah manufaktur tekstil yang lebih maju daripada perkembangan teknik saat ini. Tahun 1733, seorang pembuat jam, **John Kay**, menemukan *penggulung benang terbang* yang tidak lagi dilakukan dengan tangan dan memungkinkan menenun kain dua kali lebih cepat. Karena

meningkatnya permintaan, produksi menjadi naik pula, walaupun penemuan ini dan penemuan revolusi industri yang lain sebetulnya tidak merugikan para penenun, namun rakyat pedesaan yang dirugikan.

“Pemagaran” atau penyesuaian pertanian pada perdagangan perkotaan, seperti yang menjadi keluhan filsuf Thomas Morus (1478-1535) sebagai “Domba makan manusia”, secara ekonomis memang baik, namun hal itu dilakukan dengan cara yang sangat brutal. Agar dapat meningkatkan produksi benang wol yang sangat digemari itu, harus diciptakan padang rumput yang luas bagi domba-domba dan hal ini ternyata hanya dapat terjadi dengan cara mengorbankan petani kecil. Tanah mereka dirampas dan mereka sendiri diusir dari tanah yang mereka kerjakan. Selain itu mereka juga kehilangan hak untuk mengolah tanah desa.

“Dimana dahulu empat puluh orang bekerja untuk hidupnya, sekarang hanya ada seorang laki-laki dan seorang penggembala domba”, tulis seorang penulis kronis sejarah. Seorang laki-laki itu adalah si pemilik tanah yang tanahnya bertambah luas dan

memagar sekeliling tanah tersebut sebagai tanda kepemilikannya. Sebagai "ganti rugi", biasanya ia membayar uang kepada petani dalam jumlah yang hanya cukup untuk bermabok-mabokan, itu pun hanya selama sebulan saja.

Akibat "pembelian tanah petani secara paksa", yang terjadi hingga abad ke-19; tumbuhlah suatu **kelas proletar**, sebuah pasukan yang terdiri dari buruh harian, pengemis, pencuri, dan gelandangan yang kemudian membanjiri kota-kota.

Disamping perkembangan Merkantilisme yang terlebih dulu, yang berawal pada abad ke-11, berperilaku sebagai suatu faktor utama dalam pelemburan struktur-struktur feodal, maka kota-kota yang berkembang itu, pada intinya senantiasa tergantung kepada sistem lama dan memainkan suatu peran konservatif segera setelah kota-kota itu memperoleh suatu tingkat kekuasaan.

Seorang teman Adam Smith, ahli mekanik bernama James Watt, pada tahun 1765 membuat mesin uap pertama sebagai sebuah tanda nyata dari Revolusi Industri. Tiga tahun kemudian mesin uap itu telah berkembang menjadi mesin peniup angin dalam

sebuah tungku pembakaran yang besar. Tahun 1785 mesin-mesin itu telah menggerakkan mesin tenun kapas.

Ternyata manusia sulit menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang telah berubah itu. Kebanyakan dari mereka telah terbiasa, untuk bermabok-mabokan pada hari Senin, jika di hari Minggu masih punya sisa uang dua *shilling* di kantung. Dengan kemunculan tiba-tiba sebuah mesin yang menentukan proses kerja maka dituntut pula sebuah moral kerja baru. Karena mesin-mesin tidak boleh berhenti bekerja karena memakan ongkos, maka siapa bolos kerja akan dipecat dan siapa bermalas-malasan, dihukum potong gaji.

Bagi kaum Merkantilis, saat itu tidak ada perbedaan antara pengertian kerja dan kemiskinan. Tanpa peduli mereka berkotbah bahwa upah belum cukup rendah dan jika seorang petani atau tukang ingin menabung, maka hal tersebut dianggap "kemalasan yang ditabung untuk masa depan".

Sebaliknya, bagi Adam Smith yang berhati mulia, jelas bahwa kerja adalah sumber dari segala kemakmuran, oleh karena itu ia

menggugat, bahwa si produsen kekayaan itu (buruh) sangat sedikit mengecap kekayaan yang mereka produksi. Buruh yang patut dikasihani itu, yang menopang bangunan masyarakat manusia di atas pundaknya, berada di lapisan terbawah dalam masyarakat itu sendiri. Bahkan karena sangat tertekan oleh beratnya beban tersebut, maka "dia seolah akan tenggelam ke dalam tanah sehingga tak akan terlihat lagi". Adam Smith juga memperingatkan: "Tak ada satu masyarakat pun yang akan berkembang tanpa bahaya dan tak ada yang akan bahagia, jika sebagian besar anggota masyarakatnya miskin dan sengsara".

Didorong oleh rasa prihatin, sipendahulu kapitalisme ini menyetujui usaha kaum buruh untuk "berkoalisi" mendirikan serikat buruh. Ia juga memperjuangkan agar; yang miskin membayar pajak yang lebih murah (sesuatu hal yang lebih didasari oleh moral daripada logika), tentara dan jalanan yang dibiayai negara dari pajak yang dapat dinikmati bersama oleh yang kaya dan yang miskin. Walaupun Adam Smith turut merasakan penderitaan mereka, ia tetap yakin bahwa penderitaan tersebut hanyalah seperti rasa sakit di saat melahirkan bagi sebuah sistem masyarakat yang baru. Rasa

sakit itu akan segera hilang begitu kapitalisme dapat mengembangkan kekuatannya.

Adam Smith pribadi tidak perlu menunggu hal itu terjadi, karena ia tumbuh dewasa tanpa pernah merasakan kesengsaraan di Kirkcaldy dekat Edinburg, di pantai Laut Utara Skotlandia, yang ketika itu hanya berpenduduk 1.500 jiwa. Tentang masa kecil Adam Smith dan juga hari tuanya hanya terdapat sedikit fakta yang dapat dipercaya. Ayahnya adalah seorang pengacara dan pengawas bea cukai yang meninggal dua bulan sebelum kelahiran putranya itu. Hubungan Adam Smith dengan ibunya, putri seorang tuan tanah, sangat dalam dan lembut. Sehingga "walaupun saat itu ia terkena!", menurut seorang penulis biografi Jerman, *Reckten-walt*, "ibunya tetap merupakan tempat perlindungan dan pelarian baginya seperti pada masa kanak-kanaknya".

Ia adalah anak tunggal. Badannya lemah dan punya kebiasaan lebih memperhatikan pikirannya sendiri dari pada keadaan sekelilingnya. Kecenderungannya untuk melamun dan bicara sendiri itu segera menjadi bahan anekdot. Misalnya sebagai

orang dewasa yang berjalan ditengah kota Edinburg, ia hanya memakai baju tidur dan baru sadar beberapa jam kemudian. Seorang temannya bahkan menyamakan cara jalan Adam Smith seperti seekor cacing.

Dari tahun 1730 sampai tahun 1737, Adam Smith sekolah di Burgh School di Kirkcaldy. Lalu ia melanjutkan sekolahnya di sebuah *college* di Glasgow. Disanalah ia belajar bahasa Latin, bahasa Yunani, matematika, dan filsafat moral selama tiga tahun. Ekonomi (ilmu yang mengatur anggaran secara benar) yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari ilmu filsafat moral, kelihatannya tidak begitu menarik perhatiannya. Tapi yang pasti ia mendengar kuliah tentang *kebebasan dalam perdagangan* dari **Hutchison**, yang tak terlupakan olehnya.

Francis Hutchison (1694-1747), termasuk pendahulu sebuah teori etis yang kemudian dinamai *utilitarisme* (menyerupai ajaran tentang kegunaan) yang mempengaruhi para politikus di Inggris yang menginginkan kebahagiaan dan yang berpendapat bahwa keadaan yang paling baik adalah "kebahagiaan sebesar mungkin

bagi sebanyak mungkin manusia". Hal terakhir inilah yang menjadi ukuran untuk menilai tingkah laku individu.

Artinya, menurut pendapat mereka, hanya perbuatan-perbuatan yang bertujuan pada kegunaan untuk umum saja yang merupakan perbuatan baik. Maksud perbuatan tidak perlu baik, tetapi akibatnya yang perlu baik. Membeli sebuah mantel bertujuan untuk memanasakan badan pembelinya. Sedangkan akibat baik dari pembelian mantel ini adalah penyediaan tempat kerja.

Juni tahun 1740, Adam Smith, yang ketika itu berumur 17 tahun, mendapat beasiswa dari Oxford Universitas, yang sekarang termasuk salah satu Universitas terbaik di dunia namun dahulu dalam keadaan yang sangat buruk. Profesor-profesor Oxford saat itu hidup bersenang-senang dan jarang mengajar. Sikap reaksioner mereka terlihat antara lain dengan melarang para mahasiswanya membaca buku-buku filsafat modern. Ketika Smith tertangkap basah sedang membaca **Traktat Tentang Alam Manusia** dari David Hume, ia mendapat peringatan keras dan buku yang "memalukan" itu dirampas. Dua puluh tahun kemudian pemikir jenius dari Koeningsberg-Prusia, **Immanuel Kant**,

mengembangkan traktat tersebut dengan dogmanya yang mengawang menjadi inspirasi untuk *Kritik der reinen Vernunft*-nya.

Menurut Adam Smith, dalam kehidupan ekonomi sehari-hari kapitalisme menunjukkan **sikap dan moral** yang:

- Memperbolehkan **kapital** atau uang untuk dimiliki oleh **perorangan/secara individual**;
- Memperbolehkan penggunaan uang, modal, atau kapital untuk **memproduksi dan mendistribusikan barang** dengan **motif memperoleh laba**;
- Memperbolehkan **laba yang ditumpuk terus** hingga menjadi kapital yang sangat besar; serta
- Memperbolehkan **penggunaan laba** yang menjadi kapital itu untuk mendirikan pabrik-pabrik (unit produksi) baru baik yang sejenis maupun yang bidang geraknya berlainan sama sekali.

Bagi Adam Smith, Sistem Ekonomi Kapitalisme mengenal, mengakui, dan menghormati **Mekanisme Pasar**, karena itu di dalam sistem tersebut jumlah **produsen** barang dan jasa tidak terhingga banyaknya - dimana masing-masing menawarkan

produksinya kepada para konsumen yang anonim. Para konsumen datang ke pasar untuk mencari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di pasar (dalam arti abstrak) bertemulah para produsen yang menawarkan barang dan jasanya dengan para konsumen sehingga terjadi proses jual beli dan juga proses pembentukan harga.

Secara historis, Mekanisme Pasar menurut Adam Smith adalah instrumen raksasa yang berlaku sebagai *invisible hands* guna melakukan alokasi terhadap faktor-faktor produksi secara optimal, yang berarti juga alokasi pendapatan secara optimal.

Kecuali mengatur alokasi faktor-faktor produksi, mekanisme pasar juga mengandung prasyarat kebebasan mengkonsumsi pada para konsumen. Perilaku para konsumen atas dasar preferensi-nya itulah, yang dinyatakan dengan niat dan tindakan untuk membeli barang dan jasa yang disukainya dengan harga yang bersedia dibayarnya dan dengan menggunakan isyarat-isyarat (*signals*) yang luwes.

Dengan kebebasan memproduksi dan berdistribusi oleh siapapun, kebebasan pada konsumen untuk menentukan pilihannya, beserta persyaratan harganya dalam jual-beli, produsen dan konsumen bertemu di pasar sempurna (*perfect market*) yang lengkap dengan interaksi permintaan dan penawarannya.

Interaksi kekuatan permintaan dan penawaran itulah yang membentuk harga. Harga yang menjadi signal dan isyarat-isyarat dalam jual-beli kemudian akan berbalik menuntun dan menggiring proses produksi dan konsumsi sedemikian rupa, sehingga akhirnya alokasi faktor-faktor produksi dan alokasi pendapatan menjadi lebih optimal.

Kapitalisme, yang tidak dapat dipisahkan dengan mekanisme pasar seperti digambarkan oleh Adam Smith, ternyata tidak otomatis membawa keseimbangan dan keadilan sosial ekonomi seperti yang dibayangkannya. Justru mekanisme pasar yang seharusnya bekerja dengan pengaturan oleh *the invisible hands* (tangan-tangan yang tak terlihat) itu telah lama *didistorsi* atau sengaja *diselewengkan* oleh produsen yang lebih kuat dengan tujuan untuk mematikan produsen yang lebih lemah dan

mengeksploitasi konsumen dan buruh. Semua dampak penyelewengan mekanisme pasar itu telah dialami oleh Inggris selama *Revolusi Industri* berlangsung (abad ke 17).

Terhadap pandangan Kapitalisme Adam Smith, Prof. Soerjanto Poespowardojo menyatakan;

Dengan penyempitan fungsi rasionalitas menjadi instrumental, maka dalam masyarakat industrial-kapitalistis sejak abad ke-19, terjadilah proses ekonomi pasar yang cenderung berjalan dengan hukum-hukumnya sendiri yang logis rasional menjadi sistem yang otonom, yaitu lepas dari nilai yang memberikan pemaknaan dan terpisah dari bidang-bidang kehidupan lainnya

Dalam otonomi ekonomi pasar yang kapitalistis itu berlakulah prinsip utama bahwa segala sesuatu harus dikuasai dan dapat dikuasai dengan mereduksinya ke dalam satu keseluruhan barang atau produk yang bisa dimatematisasi, diformalisasi, serta dimanipulasi melalui proses kerja untuk mendapatkan nilai tambah menuju pertumbuhan, tanpa perhitungan arti dan maknanya sebagai kriteria internal.

Untuk itulah kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang 'mandiri' yang bergerak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, melaksanakan akumulasi modal untuk mengkonsentrasikan kekuatan, menjalankan ekspansi usaha ke hulu dan ke hilir dalam bentuk-bentuk yang monopolistis, dilengkapi dengan manajemen yang rasional serta didukung oleh teknologi canggih yang membuat sistem menjadi makin efektif dan efisien.

Meskipun pandangan Adam Smith ilmiah dan bersifat filsafati, secara moral adapula kelompok pemikir yang merasa berkeberatan, karena pandangan Adam Smith dipandang akan menjerumuskan orang miskin ke neraka kehidupan ekonomi.

Beberapa reaksi hebat terhadap kapitalisme yang dijumpai adalah berupa empat macam filsafat radikal pokok, yaitu:

1. **Sosialisme Utopis** (Utopian Socialism)
2. **Sosialisme Marxis dan Komunisme** (Marxian Socialism and Communism)
3. **Sindikalisme** (Syndicalism)
4. **Sosialisme Kristen** (Christian Socialis).

Lebih rinci tentang filsafat-filsafat radikal tersebut dapat ditemui dalam tulisan DR. Winardi.

Negara-negara Eropa Timur misalnya, setelah Perang Dunia ke-2 telah meninggalkan sama sekali Kapitalisme dan mekanisme pasar-nya itu. Hak milik perorangan ditiadakan karena semua adalah milik negara dan semua orang adalah pegawai negeri. Mekanisme Pasar yang dihapus kemudian diganti dengan perencanaan dan aturan perdagangan yang ditentukan oleh pusat kekuasaan (**sentralistis**) dimana; barang apa yang harus diproduksi, berapa banyak, dijual kepada siapa dan dengan harga berapa, sepenuhnya ditentukan oleh **perencanaan terpusat** itu.

2.2. Sosialisme-Komunisme

Pandangan Karl Marx-lah yang menjadi dasar sanggahan terhadap Kapitalisme Klasik Adam Smith dan yang mendorong perkembangan Eropa Timur seperti disebut sebelumnya. Pandangan Marx diutarakannya dalam naskah-naskah seperti

“Zur Kritik der politischen Oekonomie” (1858) dan “Das Kapital” (1867). Dengan pandangan dalam naskah-naskah itulah maka Marx dipandang sebagai pelopor mazhab **Sosialisme Ilmiah** (*Der wissenschaftliche Sozialismus*); yang disisi lain berlawanan dengan **Sosialisme Utopia**.

Karl Marx memiliki pandangan-pandangan yang tajam sendiri, termasuk terhadap pandangan Kapitalisme. Antara lain ia berpendapat bahwa pada awal periode abad ke-16, di Inggris telah muncul apa yang disebut sebagai permulaan proletariat, suatu lapisan petani yang kehilangan tanah garapannya, yang merupakan suatu kelompok mengambang yang mobil, yang terpisah dari alat-alat produksinya dan terlempar ke pasaran sebagai “buruh upahan yang bebas”. Marx kemudian menyatakan dengan sinis bahwa para ahli ekonomi politik mengatakan tentang terbebasnya orang dari ikatan pembatasan feodal, dan sama sekali mengabaikan fakta bahwa kebebasan ini membawa serta ‘pelanggaran yang paling memalukan atas hak pemilihan yang paling kudus’ dan tindakan kekerasan yang paling buruk terhadap manusia.

Lebih lanjut juga akan ditunjukkan oleh Marx, bahwa di dalam kejadian-kejadian itu sendiri, peristiwa-peristiwa ini tidak dapat dianggap sebagai syarat-syarat yang cukup bagi munculnya kapitalisme. Pada peralihan abad ke-16, sisa-sisa feodalisme yang sedang hancur lebur itu bersikap memilih antara kehancuran terus dan suatu gerakan untuk bentuk produksi yang lebih maju : *kapitalisme*. Suatu faktor yang agak penting dalam rangsangan ke perkembangan kapitalisme adalah perluasan perniagaan lewat lautan yang jauh, yang berlangsung cepat dan berkembang sebagai hasil penemuan-penemuan geografis yang mengejutkan yang diperoleh di dalam bagian terakhir abad ke-15. Termasuk di dalam penemuan-penemuan geografis ini, terutama adalah penemuan Amerika dan pelayaran mengelilingi Tanjung Harapan.

Penemuan-penemuan itu ditunjang oleh perkembangan yang cepat dalam perniagaan, navigasi dan industri, suatu dorongan yang sebelumnya belum pernah diketahui orang, juga kepada unsur revolusioner di dalam masyarakat feodal yang sedang goyah. Pemasukan kapital yang cepat, yang berasal dari perniagaan yang tumbuh subur bagaikan jamur, ditambah pula

oleh membanjirnya logam-logam mulia ke dalam negeri sejak penemuan emas dan perak, melanda tata sosial dan ekonomi yang telah ada di Inggris. Pabrik-pabrik baru didirikan di kota-kota pelabuhan dan di pusat-pusat negeri, diluar penguasaan kota-kota perniagaan yang telah tua dan organisasi-organisasi serikat sekerjanya. Usaha-usaha baru yang didirikan itu mengalami pertumbuhan yang cepat, kendatipun 'ada perlawanan sengit dari pihak kota-kota niaga terhadap tempat-tempat bibit perindustrian baru'.

Dengan demikian kapitalisme modern bermula di tempat yang jauh letaknya dari pusat-pusat perpabrikaan lama, 'yang didasarkan atas perniagaan maritim dan yang melintasi negeri dalam skala besar'. Perpabrik terorganisasi tidak bersumber pada Industri pertukangan yang dikuasai serikat-serikat sekerja, akan tetapi pada yang disebut Marx 'operasi-operasi tambahan dari daerah pedesaan' yang berkaitan dengan pemintalan tenun yang memerlukan sedikit latihan teknis. Masyarakat pedesaan itu merupakan tempat terakhir untuk perkembangan kapitalisme dalam 'bentuk yang paling murni', namun dorongan pertamanya

adalah disitu. Sebelum tingkat ini tercapai kapital belum merupakan kekuatan revolusioner.

Karl Marx lulus dari Universitas Bonn dan kemudian dari Universitas Berlin dimana ia menjadi murid filsuf besar Hegel, namun kemudian ia berbeda pendapat dengan pandangan terutama menyangkut tata susunan masyarakat. Pada awalnya metodologi Dialektika-nya Hegel mengenai *Tesis - Antitesis - Sintesis* diterimanya, namun kemudian ia menjungkir balikkannya baik dalam *sifat, makna, maupun tujuannya*.

Karl Marx kemudian mempelajari ilmu ekonomi dengan sungguh-sungguh dan mendalam, setelah ia pindah ke London, beberapa tahun sesudah mengumandangkan **Manifesto Komunis**. Di London, karya-karya ilmiah yang berarti dari zaman **Pra-Klasik** dan zaman **Klasik** serta tulisan-tulisan lain dari zamannya sendiri, hampir semua dipelajarinya dengan seksama dan dikaji secara kritis. Pada akhirnya, dalam ilmu ekonomi Marx dianggap sebagai ahli teori yang unggul serta menguasai sepenuhnya substansi dan teknik analisis ekonomi.

Pengetahuannya dalam hal teori ekonomi nampak sekali bertolak belakang dengan mazhab **Physiokrasi (Turgot)** dan terlebih lagi dengan mazhab **Kapitalisme Klasik (Adam Smith dan David Ricardo)**. Dalam pandangan Marx, ciri pokok masyarakat kapitalis ialah hak perseorangan atas pemilikan alat-alat produksi dalam masyarakat yang kemudian diikuti oleh dampak negatif berupa eksploitasi, dan lain-lain.

Tentang Marx, Winardi menulis;

Marx merupakan seorang ahli ekonomi yang menekankan segi filsafat. Ia berupaya keras untuk merumuskan sebuah "teori ilmiah" yang kemudian dipublikasikan sebagai karyanya yang monumental yang berjudul *Das Kapital* (1867). Buku tersebut dinyatakan orang sebagai "the doomsday book of capitalism". Dalam buku tersebut diramalkan oleh Marx bahwa sistem kapitalistis akan digulingkan secara revolusioner, dan ia akan diganti oleh sebuah masyarakat tanpa kelas yang hanya terdiri dari para pekerja atau kaum proletar (proletariats) yang memiliki dan mengelola alat-alat produksi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Keadaan akhir tersebut dinamakannya "komunisme", untuk membedakannya dari aneka macam bentuk sosialisme yang "non-ilmiah", seperti misalnya sosialisme Utopis.

Secara garis besar pandangan-pandangan filsafat yang berkait dengan sistem ekonomi akhirnya terhimpun di dalam dua kubu utama yaitu **Kapitalisme Klasik** - Adam Smith dan **Sosialisme** - Karl Marx. Sintesis diantara pandangan-pandangan dari kedua kubu itulah yang dipercaya telah melahirkan berbagai sistem-sistem ekonomi lain (yang lahir kemudian), termasuk juga yang dimaksud dengan **Sistem Ekonomi Pancasila**.

CATATAN

Sebagai penutup bagian ini baiklah kita menengok refleksi filosofis yang diutarakan Prof. Soerjanto tentang kedua ideologi utama dunia tersebut.

Akibat sistem industrial yang kapitalistis ini ialah di samping tercapainya pertumbuhan yang sudah menjadi tujuannya, terjadi juga eksploitasi tenaga kerja dan proletarisasi sebagaimana dikemukakan oleh Marx, peradaban teknokratis yang mencerminkan semangat kebendaan dan bentuk penguasaan produksi yang serba kebendaan (Horkheimer, Adorno), *Verdinglichung*, termasuk manusia yang tergeser

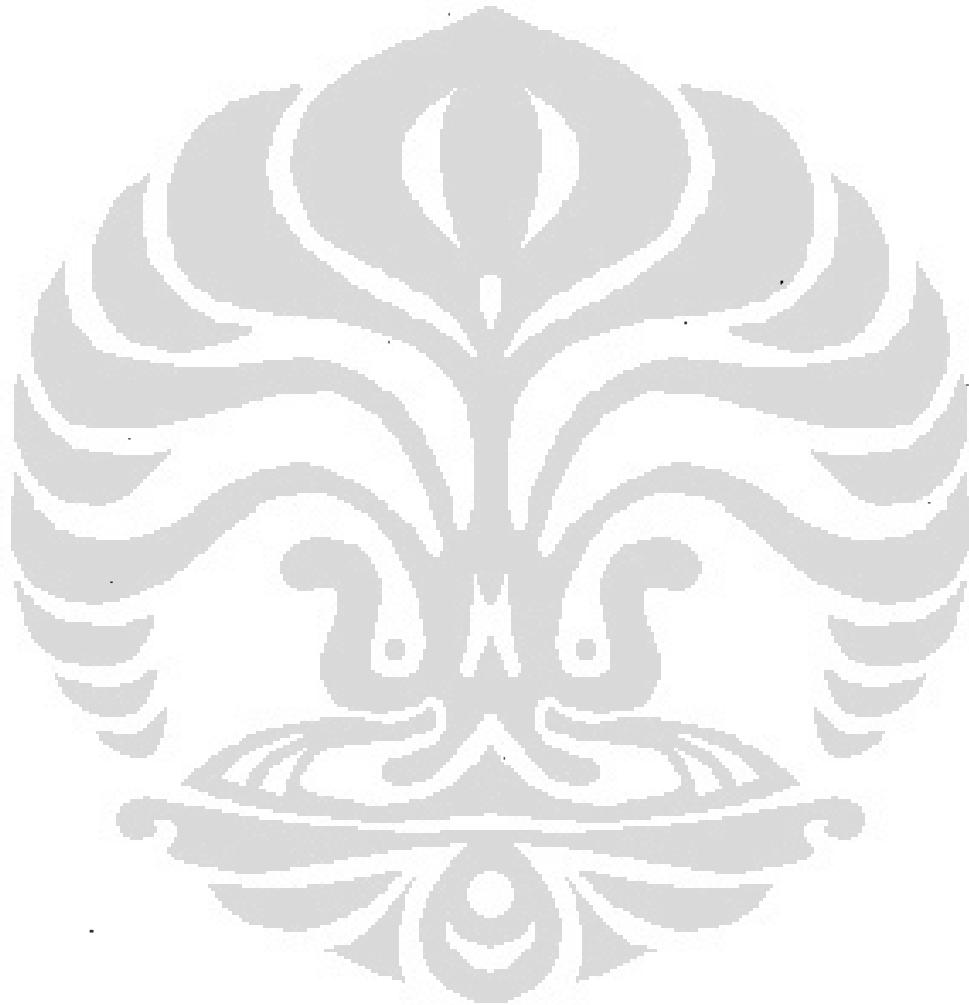
berdimensi satu (Marcuse), dalam artian direduksi menjadi fungsi dan tunduk pada prinsip efisiensi semata-mata.

Sebagai reaksi terhadap sistem masyarakat demikian itu Lenin yang mengikuti jejak Marx berusaha membentuk sistem tandingan yang berdasarkan materialisme dialektis dengan prinsip yang sama, yaitu bahwa dunia harus dan dapat dikuasai sepenuhnya dengan menjalankan reduksi atas gejala dan kenyataan hidup menjadi sistem kekuatan produksi yang dapat dimatematisasi, diformalisasi dan dimanipulasi secara teknokratis untuk tujuan tertentu, yaitu kemenangan proletariat.

Menurut pandangan ini ..., maka perlu dibentuk gerakan-gerakan revolusioner untuk merebut kekuatan produksi tersebut menjadi milik serta pengelolaan kolektif. Dalam masa transisi menuju terwujudnya masyarakat komunis, kekuasaan menjadi unsur mutlak dan bahkan merupakan tujuan utama untuk dapat menghancurkan kapitalisme, serta menyusun sistem yang tertutup dengan pola birokrasi yang otoriter, mekanisme politik yang berintikan diktatur partai dan ekonomi perencanaan yang dijalankan secara ketat.

Dalam sistem industrial-komunistis ini berjalan pula rasionalitas dalam pengelolaan teknis menuju efisiensi, namun disertai dengan

ketertutupan sistem politik dan ekonomi, sehingga terjadilah penindasan sebagai akibatnya, teror ataupun tindakan-tindakan dehumanisasi di kalangan rakyat





BAB III.

IDEOLOGI - IDEOLOGI UTAMA DUNIA DAN SISTEM EKONOMINYA

Sistem perekonomian (ekonomi) berbeda dengan Struktur perekonomian (ekonomi). Walaupun ideologi yang ditarik dari pemikiran filosofis bisa dijumpai di kedua hal tersebut (baik sistem maupun struktur), seperti dijumpai dalam pembahasan tentang Ekonomi Pancasila, namun kandungan pemikiran filosofis itu akan lebih kental dirasakan di dalam pembicaraan tentang Sistem Ekonomi.

Sistem Ekonomi yang kita kenal dibentuk dari kelompok-kelompok kekuatan sebagai berikut:

- 1. Sumber-sumber historis, kultural, cita-cita, keinginan, serta sikap penduduknya;**
- 2. Sumber daya alam termasuk iklimnya;**
- 3. Filsafat yang dimiliki dan yang dibela oleh sebagian besar penduduknya;**
- 4. Teoritisasi penduduk zaman lampau dan sekarang tentang bagaimana cara mencapai cita-cita dan tujuan yang dipilih;**
- 5. Uji coba yang dilakukan penduduknya dalam upaya mereka mencari dan mencapai alat-alat ekonomi**

Sedangkan Struktur Perekonomian yang menjadi wadag dari Sistem Ekonomi akan ditentukan oleh:

- 1. Kebutuhan manusia,**
- 2. Jumlah, sifat, susunan manusia**
- 3. Konstelasi alamiah negara yang bersangkutan**
- 4. Pengetahuan teknik**
- 5. Organisasi yuridis serta sosial masyarakat.**

Dengan demikian dapat dimengerti bila orang berpandangan bahwa pada umumnya relatif lebih mudah mengubah sistem ekonomi suatu perekonomian daripada struktur ekonominya. Hal ini mudah ditunjukkan pada zaman Orde Lama yang kaya dengan berbagai peraturan dan dengan slogan seperti "Berdiri di atas Kaki Sendiri" dan "Banting Stir ke Kiri", disamping itu terjadi pula bahwa sistem ekonomi Indonesia yang relatif "bebas" dapat diubah menjadi sistem ekonomi "terpimpin" atau perekonomian "komando"

3.1. Kapitalisme - Liberalisme

Secara harfiah, kapitalisme berarti kepemilikan pribadi (*individu*) atas faktor-faktor produksi tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan ("entrepreneurship"). Ada yang menganggap teknologi sebagai faktor produksi tersendiri. Di lain pihak, ada yang memperlakukan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan ("embodied") dalam barang modal maupun tenaga kerja serta kewiraswastaan. Karena faktor-faktor produksi dimiliki

oleh perorangan, maka badan usaha dalam sistem kapitalisme juga dimiliki oleh individu.

Wiraswasta (entrepreneur) rupanya menduduki peranan sentral dalam Sistem Kapitalis. Wiraswasta itu mengkoordinir dan mempekerjakan faktor-faktor produksi dalam badan usaha untuk menghasilkan barang-barang serta jasa-jasa. Wiraswasta dalam konsep **Schumpeter** adalah seseorang yang memiliki kemampuan teknologi pertukangan untuk memproduksi sesuatu komoditi baru dengan biaya produksi yang lebih murah. Wiraswasta dalam konsep ini mengembangkan perusahaannya dari bengkel kecil mejadi perusahaan raksasa. Persaingan pasar yang dihadapi oleh wiraswasta, dalam konsep Schumpeter, adalah persaingan sempurna ("perfect competition"). Jenis dan kualitas komoditi yang dijual-belikan adalah bersifat *homogen*. Penjualan maupun pembelian setiap unit pelaku ekonomi hanya merupakan suatu fraksi kecil dari volume penjualan dan pembelian pasar. Oleh karena itu, secara sendiri-sendiri unit pelaku ekonomi tidak dapat mempengaruhi tingkat harga pasar.

Berbeda dengan Schumpeter, dalam konsep Galbraith Wiraswasta justru menghadapi persaingan yang kurang sempurna ("imperfect competition") seperti duopoli maupun oligopoli. Skala unit perusahaan juga jauh lebih besar daripada dalam model persaingan sempurna. Komoditi yang diperjual-belikan tidak lagi bersifat homogen. Rokok kretek tidak sama dengan cerutu, tembakau pipa, maupun rokok putih. Rokok kretek merk Bentoel tidak identik dengan merk Jarum dan komputer buatan perusahaan Toshiba tidak identik dengan buatan IBM.

Wiraswasta dalam model ini adalah terdiri dari sekelompok 'teknokrat' (termasuk ahli teknik) yang memiliki akses yang sama terhadap informasi. Para wiraswasta mengembangkan perusahaan dan melakukan penetrasi pasar melalui penguasaan dan kemampuan menggunakan informasi tersebut.

Uraian yang lebih lugas dari Winardi mendiskripsikan perekonomian bebas sebagai berikut.

Pada stelsel perekonomian bebas, diasumsi adanya kebebasan konsumsi dan produksi (freedom of spending and consumption).

Kebebasan produksi meliputi beberapa hal sebagai berikut;

- Hak milik privat
- Kebebasan membuat perjanjian-perjanjian
- Kebebasan untuk menginvestasi
- Kebebasan untuk bekerja.
- Syarat-syarat tersebut merupakan landasan bagi individualisme.

Kembali pada ide dasar Kapitalisme Adam Smith tentang konsep pasar maka menurut Winardi harga pasar merupakan pedoman untuk bertindak ekonomis yang terbentuk di pasar sebagai hasil permintaan dan penawaran.

Sebuah perekonomian bebas yang ideal harus bebas dari unsur-unsur monopoli sehingga persaingan yang terjadi bersifat murni. Di dalam "persaingan murni" tersebut para pembeli tidak mempunyai preferensi terhadap penjual (tidak ada pilih kasih) dan mereka hanya melihat harga dalam hal melakukan pembelian-pembelian.

Kondisi menarik (terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia) dari sebuah persaingan murni, adalah bahwa penjualan suatu produk yang distandardisasi dilakukan oleh

sejumlah besar perusahaan kecil. Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa keadaan demikian hanya terjadi pada apa yang dinamakan "*termijnmarkten*" untuk produk-produk agraris dan bahan-bahan mentah, tidak pada semua pasaran produk.

Catatan:

E. Chamberlin dalam bukunya *The Theory of Monopolistic Competition* (1934) menggunakan istilah "pure competition", sedangkan penulis lain menggunakan istilah "perfect competition".

J. Robinson dalam *The Economics of Imperfect Competition* (1933) menyatakan bahwa:

"... Perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. This entails, first, that the number of sellers is large, so that output of any one seller is a negligibly small proportion of the total output of the commodity, and second, that buyers are all alike in respect of their choice between rival seller, so that the market is perfect".

3.2. Sosialisme - Komunisme

Pembicaraan tentang sistem perekonomian sosialis dan komunis tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Karl Marx, sekalipun tidak ingin dianggap seorang filsuf, yang telah dianggap orang sebagai seorang ahli filsafat ekonomi (philosophical economist). Ia sendiri sesungguhnya banyak dipengaruhi oleh seorang ahli filsafat Jerman abad ke-19 yang bernama George Hegel, terutama dengan teori dialektika-nya.

Dalam filsafat Hegelian, proses dialektika melalui rekonsiliasi hal-hal yang bertentangan satu sama lain menjadi sebuah metode untuk menafsirkan sejarah. Jadi pada evolusi peradaban (kultur) kita dapat melihat adanya suatu proses dimana bentuk kultur yang lebih tinggi mengalahkan bentuk yang lebih rendah. Dalam bidang pengembangan seni dapat terlihat bahwa "periode" tertentu diganti dengan periode lain.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sejarah merupakan suatu urutan kemajuan dimana prinsip dialektika berkembang dari manifestasinya dari tingkat rendahnya ke tingkat yang lebih tinggi.

Pemikiran-pemikiran Marx yang dikembangkan secara 'terbalik' dari Dialektika-nya Hegel itulah yang dituangkannya dalam doktrin-doktrin fundamentalnya di dalam Das Kapital yang menyangkut :

1. penafsiran sejarah secara ekonomis,
2. teori tentang nilai dan upah
3. teori tentang nilai lebih dan akumulasi modal
4. pertentangan kelas
5. teori tentang evolusi sosialis dan komunis.

Dari kerangka dasar teori di atas kemudian berkembang pemikiran-pemikiran berikut:

Penafsiran Sejarah secara Ekonomis

Dalam sistem Marxis kekuatan-kekuatan ekonomis merupakan sebab pokok terjadinya perubahan, menjadi alfa dan omeganya sejarah, yang bekerja seakan-akan hukum-hukum alam yang tak terelakkan untuk mendeterminasi perkembangan suatu masyarakat.

Materialisme Dialektis

Ada proses dinamis yang berlangsung terus dimana masyarakat didorong dari tahap historis yang satu ke tahap yang lain sewaktu setiap sistem baru mengalahkan sistem lama.

Teori tentang Nilai dan Upah

Bagi Marx, istilah "nilai" (value) mempunyai arti yang sama seperti bagi para ahli ekonomi ortodoks, baik sebelum maupun sesudahnya. Nilai adalah kemampuan suatu barang untuk mencapai barang-barang lain dimana barang yang bersangkutan digunakan sebagai alat pertukaran. Kemampuan tersebut diukur dengan jumlah-jumlah proporsional yang membuat suatu barang dapat ditukar dengan semua barang lainnya. Maka bagi Marx dan para ahli ekonomi lainnya harga suatu barang adalah kemampuannya untuk mendapatkan uang apabila barang tersebut digunakan sebagai barang pertukaran. Harga sebenarnya tidak lain dari "nama uang" untuk nilai suatu barang.

Yang membedakan Marx dari ahli lainnya adalah jawabannya terhadap pertanyaan "Apakah yang mendeterminasi nilai sesuatu barang?" Bagi Marx jawabannya adalah: "tenaga kerja". Menurut

Marx modal dan semua komoditi lain merupakan tenaga kerja yang terkristalisasi, maka mereka dapat dihubungkan dengan patokan umum yaitu "waktu kerja". Dan mereka dapat ditukarkan satu sama lain dengan harga-harga yang proporsional dengan jumlah waktu kerja yang ada pada mereka.

Selanjutnya teori upahnya yang dirumuskannya adalah sebagai berikut: Kelas kapitalis dalam pergulatan kompetitifnya melihat bahwa untuk mencapai laba harus dibayarkan upah terendah kepada kelas pekerja. Maka upah yang dibayarkannya akan mencapai tingkat subsistensi. Tingkat upah tersebut hanya cukup bagi para pekerja untuk sekedar mempertahankan hidup yang primer yang didasari atas kebutuhan-kebutuhan fisik dan biologisnya, dan hingga tingkat yang lebih rendah untuk kebutuhan-kebutuhan sosial dan kebutuhan lainnya.

Catatan:

Teori upah tersebut bukanlah produk Marx. Ia tidak lain daripada teori subsistensi yang diikuti Marx dari para ahli ekonomi Klasik yang mendahuluinya.

Teori Nilai Surplus dan Akumulasi Modal

Sewaktu Marx mengkombinasikan teori-teori nilai dan upahnya, maka hasil logisnya adalah ciri ketiga dari sistem teoritisnya, yaitu 'doktrin tentang nilai lebih atau surplus'.

Bagi Marx, nilai lebih (yang dicuri dari tenaga kerja) merupakan tenaga penggerak bagi sistem kapitalistis. Ia merupakan perangsang pokok yang mendorong kaum kapitalis melaksanakan produksi. Upaya kaum kapitalis memperbesar nilai lebih tersebut dapat mencapai bentuk:

1. memperpanjang jangka waktu kerja
2. mengintensifikasi atau mempercepat produksi pekerja (melalui sistem upah potongan atau perangsang-perangsang lain)
3. menggunakan mesin-mesin yang menghemat tenaga kerja.

Akumulasi Modal

Akumulasi Modal adalah adalah alat kapitalis untuk memperbesar usaha dan laba yang didapat, dan hal ini ditentang oleh Marx karena dilakukan oleh sang kapitalis dengan nilai lebih yang menurut Marx dicuri dari pekerjaan para pekerja. Menurut Marx adalah: Sang kapitalis menggunakan sebagian dari surplus

tersebut untuk konsumsi pribadinya dan sebagian lagi untuk mencapai lebih banyak tenaga kerja dan mesin-mesin.

Pertentangan Kelas (*the Class Struggle*)

Menurut Marx, sejarah selalu memperlihatkan pertarungan antara kelas-kelas. Pada masyarakat modern yang timbul dari puing-puing masyarakat feodal, antagonisme kelas telah dipersempit menjadi pertarungan antara dua kelompok yang bertentangan satu sama lain, yakni kelas kapitalis yang menindas atau kelas borjuis, dan pihak yang ditindas, yakni kaum proletar atau kelas pekerja.

Apakah peranan pemerintah pada masyarakat yang terdiri dari dua kelas tersebut? Jawaban Marx adalah: Negara (pemerintah tidak lain dari kekuasaan kolektif yang terorganisasi dari kelas-kelas yang memiliki harta kekayaan. Ia sebuah badan yang dikendalikan oleh kaum borjuis untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, dan kekuasaannya kian bertambah sewaktu antagonisme kelas di dalam negara semakin meruncing. Singkatnya; negara merupakan alat penindasan.

Konsekuensi-konsekuensi Produksi Kapitalis

Menurut Mars, pertentangan kelas akan berlangsung terus apabila tidak ada 'kontradiksi' tertentu yang secara otomatis (dan tidak terhindar) berkembang dalam sistem kapitalistis. Hal-hal tersebut mencakup:

1. Pengangguran yang kian meningkat
2. Tingkat laba yang makin merosot
3. Konjungtur (business cycles)
4. Konsentrasi dan monopolisasi modal
5. Kapitalisme finansial dan imperialisme

Dari pandangan-pandangannya tampak bagaimana Marx menarik kesimpulan bahwa kondisi-kondisi yang mengilhami doktrinnya menimbulkan kemelaratan dan penderitaan bagi para pekerja, yang tidak akan membiarkannya terus menerus. Katanya: Kelas pekerja akhirnya akan berontak terhadap kelas kapitalis dan mereka akan membentuk sebuah sistem dimana berlaku keadilan ekonomi. Sedangkan ide pokoknya adalah sebagai berikut: Pertentangan kelas merupakan suatu pertentangan yang tidak mungkin terselesaikan antara kaum borjuis atau kelas kapitalis dan kaum proletar atau kelas pekerja. Sumber pertentangan

adalah nilai lebih yang dicuri oleh kaum kapitalis dari para pekerja, yang dalam jangka panjang menyebabkan timbulnya pengangguran yang bertambah, laba yang makin berkurang, terjadinya gerakan konjungtrur, konsentrasi modal, dan munculnya finance capital dan imperialisme.

Tentang Marx, Joseph Schumpeter, mengatakan "... the other (Marx) gave us a theoretical apparatus which for the first tim in the history of our science affectively embraced the pure logic of the interdependence between economic quantities."

Sasaran yang hendak dicapai oleh Marx melalui ideologinya adalah:

1. Mengembangkan sebuah teori sejarah yang dapat menerangkan kausa-kaus fundamental perkembangan kapitalis.
2. Merumuskan teori nilai, teori upah, dan teori tentang nilai lebih yang dapat menerangkan proses-proses dasar yang bekerja pada perekonomian kapitalis.
3. Membentuk sebuah landasan untuk sosialisme revolusioner dan komunisme.

A. Pengaruh Ideologi Marxisme

Pada akhir abad ke-19 Marxisme telah berkembang menjadi sebuah gerakan internasional. Tetapi anggota-anggotanya memiliki pandangan-pandangan yang divergen (berbeda-beda). Akibatnya adalah bahwa para pengikut Marx terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang satu merupakan kelompok mayoritas yang heterogen, dinamakan kaum "revisionis". Kelompok kedua, yaitu kelompok minoritas yang lebih homogen, dinamakan kaum "strict Marxists", yaitu kaum Marxis berhaluan keras.

Filsafat dasar kedua kelompok tersebut ternyata dari nama-nama mereka. Kaum revisionis berpendapat bahwa teori-teori Marx harus direvisi agar sesuai dengan kondisi pada saat yang bersangkutan, dan bahwasanya sosialisme harus dicapai melalui proses evolusi secara damai dan gradual, dan bukanlah melalui tindakan revolusi. Kaum Marxis haluan keras menyatakan bahwa para pekerja di dunia membentuk ikatan persaudaraan raksasa, dan mereka harus berevolusi untuk menumbangkan sistem kapitalistis serta menggantikannya dengan "dictatorship of the proletariat".

Di negara-negara Barat ternyata kaum sosialis revisionis menguasai bagian terbesar dari partai-partai sosialis sejak permulaan abad ke-20, seperti pada:

- The Unified Socialist Party di Perancis
- The Social Democratic Party di Jerman.

Di Inggris, dukungan terbesar terhadap gerakan sosialisme muncul dari "the Labour Party" yang pemimpin-pemimpinnya terutama merupakan sosialis Fabian. Di Skandinavia dukungan diperoleh dari gerakan koperasi konsumen. Partai Sosialis Kristen juga amat berpengaruh di negara-negara tertentu.

Patut digaris-bawahi bahwa pada akhir Perang Dunia II, ikatan antara kaum revisionis moderat dan kaum Marxis haluan keras putus. Kelompok terakhir menarik diri secara total dari partai-partai sosialis, dan kemudian mereka dinyatakan sebagai kaum komunis.

Catatan:

Walaupun sosialisme modern dan komunisme muncul dari pohon Marxis yang sama, mereka sangat berbeda pandangan secara politis

dan ekonomis. ... Di negara-negara seperti Inggris, Perancis, Norwegia, dan Australia, pemimpin-pemimpin sosialis mencapai kedudukan melalui pemilu-pemilu bebas. Hal tersebut berarti bahwa, apabila kita berbicara tentang sosialisme, maka kita menghubungkannya dengan sosialisme demokratis tipe reformis liberal. Hal tersebut perlu dibedakan dengan sosialisme autoriter atau komunisme seperti yang terlihat di Soviet dan RRC.

Kembali kepada perseteruannya dengan kaum kapitalis, maka selama tahun 1920-an dan 1930-an, kaum sosialis di Eropa dan Amerika melakukan serangan baru terhadap kelemahan-kelemahan kapitalisme. Serangan tersebut dilakukan dengan pokok persoalan menyangkut:

1. ketimpangan ekonomi
2. pengangguran kronis
3. kekayaan privat dan kemiskinan umum
4. degenerasi nilai-nilai sosial dan kultural,

Selain itu, melalui kontroversi tentang Model Teoritis, para penganut sosialisme membayangkan hal-hal positif yang ingin dicapainya, yaitu:

1. Distribusi pendapatan yang lebih merata karena ditiadakannya hak milik privat;
2. Penyelesaian produksi hingga lebih sesuai dengan permintaan konsumen;
3. Tingkat kesempatan kerja tinggi secara kontinu yang timbul karena kebijakan-kebijakan investasi stabil dari pihak pemerintah.

B. Sejumlah Kritik terhadap Teori Marx

Diabaikannya Fungsi-fungsi "Entrepreneur"

Dengan memberikan semua perhatian kepada unsur tenaga kerja sebagai pencipta nilai, Marx mengabaikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh pengusaha (entrepreneur) sebagai orang yang menanggung resiko dan sebagai organisator faktor-faktor produksi. Tanpa sang pengusaha, tenaga kerja hanya suatu massa yang amorf. Justru pengusahalah yang memberi "bentuk serta wajah" kepada tenaga kerja melalui tindakan mempersatukan para pekerja, menyediakan modal untuk mereka, dan memberi tujuan tertentu kepada mereka. Pada masyarakat

sosialis atau komunis fungsi-fungsi tersebut mungkin dilaksanakan oleh pemerintah atau komite pekerja-pekerja, tetapi pokoknya fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh pihak tertentu.

Tidak Diperhatikannya Permintaan

Teori nilai Marx yang didasarkan atas waktu kerja yang terkandung dalam sebuah barang tidak memperhatikan fakta bahwa nilai normal suatu barang merupakan hasil permintaan maupun penawaran. Pada sebuah sistem kapitalistis kompetitif konsep nilai normal jangka panjang berupa sebuah nilai keseimbangan yang merefleksikan berbagai macam permintaan konsumen yang membutuhkan jasa-jasa serta produk-produk faktor produksi yang langka. Hal tersebut berarti bahwa para konsumen harus bersedia dan mampu menyatakan preferensi-preferensi mereka melalui sistem harga andaikata harga-harga melaksanakan fungsi menginduksi sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya manusia untuk memasuki bidang produksi. Marx tidak memahami peranan sistem harga tersebut sepenuhnya sehingga dengan demikian teorinya tentang nilai merupakan

patokan yang tidak realistis serta tidak akurat tentang nilai-nilai nyata yang digunakan untuk mempertukarkan barang-barang.

Teori Nilai Lebih yang Kurang Landasan Teoritis

Menurut Marx, nilai lebih timbul oleh karena kepada para pekerja dibayarkan upah subsistensi yang kurang dibandingkan dengan nilai barang-barang yang diciptakan oleh mereka. Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah: Apakah teori nilai tersebut bersifat plausibel? Ternyata jawabannya lebih banyak "tidak" karena alasan-alasan berikut:

- Definisi tentang "subsistensi" tidak jelas
- Persaingan antara kaum kapitalis akan meniadakan surplus

C. Komunisme

Sebagai sebuah sistem ekonomi, komunisme (pada masa perang dingin yang baru lalu) Milton H. Spencer mempertegas definisi tentang komunisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang didasarkan atas:

1. pemilikan harta kekayaan atas negara (*social ownership of property*), termasuk didalamnya pemilikan atas sebagian besar alat-alat produksi dan distribusi;
2. perencanaan oleh negara dan pengendalian perekonomian yang bersangkutan oleh negara;
3. ketentuan-ketentuan tentang imbalan dan hukuman guna mencapai upaya produktif maksimum dari seluruh sumber daya yang ada.

Hal di atas mempertegas kenyataan bahwa konsep modern tentang sosialisme, sama sekali tidak menyerupai tipe gambaran Marx tentang tahap yang harus dilalui oleh suatu masyarakat, dalam proses evolusinya dari kapitalisme menuju ke tahap komunisme penuh. Berikut dikutip uraian yang dijabarkan oleh Winardi dalam bukunya *Kapitalisme versus Sosialisme*.

Harta Kekayaan yang Dimiliki oleh Negara (*Social ownership of Property*)

Negara-negara komunis telah mengembangkan teori Marxis bahwa hak milik privat bukan cara satu-satunya yang digunakan oleh kaum kapitalis agar dapat mengeksploitasi para pekerja dalam rangka usaha

mencapai bagian dari produk sosial yang telah sepatutnya tidak boleh diterima oleh mereka (unearned share). Hal tersebut juga merupakan landasan untuk membagi masyarakat ke dalam dua kelas besar. Maka oleh karenanya, pemilikan negara atas alat-alat produksi sangat dianjurkan di negara-negara komunis dengan tetap memberikan konsesi berupa hak milik privat kepada pihak swasta secara kecil-kecilan untuk memproduksi atau mendistribusikan barang-barang konsumsi. Tetapi konsesi-konsesi demikian hanya bersifat sementara: mereka hanya terdapat pada tahap transisional sosialisme Marxis. Dan hal tersebut akan ditiadakan apabila telah dicapai tahap komunisme penuh, dan semua harta kekayaan telah menjadi milik semua orang.

Perencanaan dan Pengawasan Pemerintah

Ciri pokok kedua komunisme dewasa ini adalah perencanaan pemerintah secara luas dan pengendalian sistem ekonomi. Metode "komando" (command) sebagian besar menggantikan metode "pasar bebas". Investasi modal, inovasi, perubahan teknologi, distribusi pendapatan, alokasi sumber-sumber daya, semua aktivitas strategis tersebut merupakan bagian dari sebuah proses pengambilan keputusan yang tersentralisasi, dan bukan lagi hasil interaksi pasar bebas antara para pembeli dan penjual. Walaupun dapat digunakan

mekanisme-mekanisme pasar, seperti misalnya kenaikan atau penurunan harga untuk menyeimbangkan suplai dan permintaan, mereka dimanfaatkan untuk mencapai sasaran-sasaran perencanaan tersebut atau untuk mengatur segmen-segmen tertentu perekonomian yang bersangkutan yang tidak mau diatur sendiri oleh para pemimpin.

Sistem Imbalan dan Hukuman

Sesuai dengan ideologi Marxis, negara-negara komunis dewasa ini tidak menyatakan bahwa mereka sudah tiba pada tahap "komunisme penuh" dimana tidak ada pemerintah dan kaum buruh hidup berdasarkan moto: "Setiap orang memberikan sumbangsuhnya sesuai dengan kemampuannya, dan setiap orang diberi bagian (dalam pendapatan nasional) sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya." Mereka menyatakan bahwa mereka sedang berada pada tahap persiapan atau peralihan sosialisme dimana pendapatan didistribusikan menurut rumus: "Setiap orang memberi sumbangsuhnya sesuai dengan kemampuannya, dan masing-masing orang memperoleh imbalan menurut pekerjaan yang dilakukannya."

Dinegara-negara komunis dewasa ini, pembayaran didasarkan atas keterampilan, tingkat output, dan jenis pekerjaan yang dilakukan; atau dengan perkataan lain: menurut jenis imbalan seperti yang digunakan

di negara-negara kapitalistis dan negara-negara sosialis-demokratis. Sistem imbalan tersebut ditambah pula dengan sebuah sistem hukuman yang mencakup berbagai macam tipe hukuman, dan bahkan kerja paks, untuk mereka yang melakukan pelanggaran berat (terlampau banyak bolos, malas, dan kebiasaan-kebiasaan kerja buruk lainnya). Akan tetapi imbalan serta hukuman diperkirakan akan lenyap apabila komunisme penuh dicapai, sebab pada saat itu orang-orang akan bekerja dengan gembira serta efisien untuk kepentingan bersama.





BAB IV.
PANCASILA DAN
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA;
SEBUAH REFLEKSI

Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang amat menghargai ideologinya. Ideologi **Pancasila** yang diyakini oleh bangsa Indonesia lebih dari *weltanschung* atau *leitstar*, ia bahkan berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan. Untuk itu ideologi Pancasila menyoroti semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik aspek

kehidupan bersama, hukum, ekonomi, politik, ketatanegaraan, budaya, beragama, sosial, hubungan antar bangsa, hingga pertahanan-keamanan.

Dalam tulisan ini, aspek ekonomi akan menjadi pokok refleksi dengan penekanan pada pengaruh ideologi Pancasila terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Secara lugas Winardi mengutarakan pandangan tentang sistem tersebut sebagai berikut:

Sistem ekonomi Indonesia merupakan sebuah sistem ekonomi campuran (*mixed economic system*). Ada unsur-unsur kebebasan, ada unsur-unsur keterikatan. Tujuan ekonomi nasional Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Mukadimah UUD 1945 tercermin tujuan idiel ekonomi nasional Indonesia sebagai berikut:

"... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk *memajukan kesejahteraan umum*, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan *keadilan sosial*." (Winardi, p.138)

Rumusan di atas diperkuat pula dengan hukum dasar Indonesia .
Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi:
Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau
penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang
diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
kekeluargaan. *Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah
koperasi.* (Winardi, p.134)

Dalam kenyataannya walaupun Pancasila (melalui Pasal 33 UUD
1945) memberi penekanan khusus pada koperasi, namun ia tidak
berdiri sendiri, karena masih ada unsur sektor negara dan
swasta. Ketiga unsur itulah yang kemudian dikenal dengan
sokoguru perekonomian Indonesia.

Dengan berdasar pada demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi
semua orang, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus
dikuasai oleh negara. Hal itu demi mencegah tampuk produksi
yang sangat vital jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa
yang akhirnya dapat menindas kepentingan rakyat banyak. Hanya

perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Selanjutnya dengan terdapat pula pernyataan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".* Dengan isi dan bentuk pernyataan seperti itu terlihat bahwa ideologi Pancasila tampaknya agak imperatif. Sehingga bagi kita menjadi jelas bahwa koperasi sebagai bangun usaha ekonomi, bukanlah tawaran yang masih boleh dipilih atas dasar selera, kesenangan ataupun minat. Koperasi adalah bangun usaha ekonomi yang langsung berkaitan erat dengan wajah demokrasi ekonomi Indonesia.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Didalam koperasi terkandung suatu wawasan kegiatan *dari semua, oleh semua, dan untuk semua*, bahkan di bawah penilikan semua (yaitu anggotanya). Selanjutnya kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang-seorang, sehingga

azas kekeluargaan dan kebersamaanlah yang harus ditumbuh kembangkan, dibina dan dimantapkan di dalam masyarakat Pancasila

Disamping itu karena yang menjadi cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia itu bukan saja terbatas pada demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi, bahkan demokrasi budaya dan kebudayaan yang semuanya berdasar pada ideologi Pancasila; maka di dalam pelaksanaan Koperasi itu sesungguhnya terkandung pula perjuangan kebangsaan (demi kesejahteraan sosial, kemakmuran masyarakat dan rakyat). Disinilah jelas bahwa **kesejahteraan** bukanlah sekedar "*material welfare*", melainkan juga bersifat lahir dan batin, yang diharapkan dapat dicapai melalui susunan perekonomian berlandaskan demokrasi ekonomi. Dengan begitu di dalam bentuk koperasi itulah terletak salah satu pilar kekuatan kebangsaan yaitu usaha bersama membangun kekuatan ekonomi.

Pola kehidupan koperasi yang mengutamakan kebersamaan, sejak dahulu hingga sekarang memang selalu, dan akan selalu menentang arus selera *perorangan-individualisme* yang melanda

masyarakat, baik karena persinggungan dengan nilai-nilai yang diambil dari bangsa lain, maupun yang telah hidup di tengah masyarakat.

Berhadapannya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam koperasi di satu pihak dengan berbagai kendala yang dihadapi di lain pihak, membuat para pengemban ideologi terus berharap nilai-nilai luhur itu tidak mengalami erosi. Sebab erosi nilai-nilai pada akhirnya akan melemahkan salah satu sendi utama kehidupan persatuan kebangsaan. (Pandangan ini bersifat ideologis dan sering diucapkan oleh para tokoh masyarakat Indonesia).

Perlu ditegaskan kembali bahwa dalam kehidupan berbangsa, ideologi merupakan suatu instrumen positif. Ideologi bisa bertindak sebagai fungsi pembangunan yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen pemersatu juga. Mengenai hubungan tersebut pendapat dari T.B. Simatupang dapat menjelaskannya.

Pancasila telah hadir dalam sejarah bangsa dan negara kita sejak tahun 1945. Waktu istilah pembangunan menempati posisi utama dalam kehidupan bangsa dan negara kita setelah kita memasuki

Orde Baru, maka hubungan antara pembangunan dan Pancasila mula-mula agak renggang. Pada waktu itu pembangunan muncul sebagai pemegang peranan utama dalam rangka reaksi dan koreksi Orde Baru terhadap politisasi dan ideologisasi yang berlebih-lebihan selama Orde Lama. Pada waktu itu pembangunan tidak lepas dari munculnya pragmatisme dan dari pengaruh buku Daniel Bell (*The End of Ideology*). (Simatupang p. 43)

Dengan demikian memang tidak tepatlah bila arah kegiatan koperasi berlangsung "top-down", seperti **demokrasi terpimpin** dengan **sistem komando**. Koperasi seharusnya lahir, tumbuh dan berkembang dari kesadaran para anggotanya sendiri yang secara bersama-sama merasa saling membutuhkan, dan saling bekerjasama dalam koperasi. Kesadaran akan koperasi; harus tumbuh dari bawah, harus didasari kesadaran bersama, bahwa maju dan berkembangnya koperasi adalah karena kerjasama yang aktif antara sesama anggota, yang didukung oleh manajemen yang baik.

Sebelum lebih lanjut berefleksi tentang sistem perekonomiannya, struktur perekonomian Indonesia perlu pula diketahui secara garis besar. Winardi berpendapat struktur perekonomian Indonesia adalah struktur agraris, yang tergantung kepada produksi primer seperti pertanian pangan dan non-pangan serta sektor ekstraktif (minyak bumi, tambang bijih mineral, kehutanan). Dengan kata lain sebagian besar produksi dan ekspor Indonesia terdiri atas komoditi hasil bumi. Selanjutnya konsekuensi struktur agraris itu adalah:

1. Sangat tergantung kepada konjungtur dunia
2. Posisi bersaing sangat lemah
3. Kurangnya daya serap bidang agraris terhadap penawaran tenaga kerja
4. Kurangnya kemungkinan mengakumulasi tabungan dari sektor pertanian
5. Prospek bidang pertanian kurang cerah dibandingkan dengan bidang industri. (Winardi, p.132)

4.1. Pandangan-Pandangan tentang Sistem Perekonomian Indonesia

4.1.1. Sosialisme Indonesia

Tinjauan historis mengenai watak sosialisme Indonesia yang tertuang di dalam sistem ekonomi yang berada di bawah sorotan ideologi Pancasila menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. **Sri Edi Swasono** dalam *Popular Capitalism* (1981) mengatakan bahwa sosialisme Indonesia adalah sosialisme religius. Ia mengutip pandangan Moh. Hatta yang berbunyi :

Pertama, Sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama. Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, maka orang terdorong ke sosialisme.

Jadi melaksanakan bayangan Kerajaan Allah di atas dunia adalah tujuannya. Kemudian perasaan keadilanlah yang menggerakkan jiwa untuk berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat, terhadap keadaan yang tidak sama dan perbedaan

yang mencolok mata antara kaya dan miskin, dan yang menimbulkan dalam kalbu manusia berbagai konsepsi tentang sosialisme. Tuntutan sosial dan humanisme itu tertangkap oleh jiwa agama, yang menghendaki pelaksanaan, dalam dunia yang tidak sempurna, perintah Allah yang Pengasih dan Penyayang serta Adil supaya manusia hidup dalam sayang-menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dan tolong-menolong serta bersikap adil.

Dengan demikian menurut Sri Edi Swasono, Sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari Marxisme (yang masuk ke Indonesia itu sebagai akibat Revolusi Oktober tahun 1917 di Rusia). Jadi yang ada hanyalah perjuangan cita-cita sosial-demokrasi Barat dengan sosialisme religius, dimana Marxisme sebagai pandangan hidup materialisme ditolak. Sosialisme memang tidak harus merupakan Marxisme dan Sosialisme disini tidak harus diartikan sebagai hasil hukum dialektika. Sosialisme religius itu adalah tuntutan hati nurani, ada dalam pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi segala orang dan yang memberikan kesejahteraan merata serta kebebasan dari segala penindasan.

Kedua, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari *jiwa pemberontakan* bangsa Indonesia yang mendapat perlakuan yang sangat tidak adil dari si penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan dan penjajahan, yang dengan sendirinya terpikat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme yang disebarkan oleh pergerakan sosialisme di Barat. Hal ini dengan kuatnya muncul sebagai tekad bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya.

Ketiga, para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima Marxisme sebagai pandangan yang berdasarkan materialisme, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri bagi mereka. Sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari segala penindasan. Sosialisme dipahami sebagai tuntutan institusional, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan peri-kemanusiaan dan keadilan sosial, selanjutnya agama menambah penerangannya.

Secara singkat pemahaman Moh. Hatta yang tentang kedudukan dan dasar sosial dari sosialisme Indonesia adalah; Dasar-dasar

bagi sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang kecil, yang bercorak kolektif, yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang.*

4.1.2. Ekonomi Pancasila

Apabila Sri Edi Swasono percaya bahwa ideologi Pancasila mempengaruhi sifat sosialis dari ekonomi di Indonesia (sehingga menjadi sosialisme religius) maka ada baiknya bila ditengok pula pandangan ahli ekonomi lainnya yaitu Mubyarto (tokoh yang sejak lama mengeluti apa yang dipercayanya sebagai **Ekonomi Pancasila**).

Mubyarto berpendapat ideologi berarti sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol dari sekelompok masyarakat atau satu bangsa, yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu.* Namun ia tidak percaya sepenuhnya keabsahan teori Klasik Barat (antara lain pandangan Adam Smith) pada sikap dasar manusia Indonesia (manusia Pancasila yang hidup secara

berkeseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat, antara kehidupan materi dan kehidupan rohani).

Mubyarto melihat implikasi sila-sila dari Pancasila dalam kehidupan ekonomi sebagai berikut:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa*; mengimplikasikan roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*; mengimplikasikan kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) yang sesuai azas-azas kemanusiaan.
3. *Persatuan Indonesia*; mengimplikasikan prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pada penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.
4. *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan*; mengimplikasikan Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan yang merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama.

5. *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*; mengimplikasikan adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat pusat dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Dari sudut lima buah "aturan main" yang diturunkan dari tiap sila dalam Pancasila itulah, kita bisa melihat sejauh mana aturan main tersebut telah ditegakkan dalam masyarakat. Misalnya sila Persatuan Indonesia, bisa diteliti setiap kasus kebijaksanaan ekonomi yang hendak diambil, apakah akan menyumbang atau tidak pada peningkatan ketangguhan atau ketahanan ekonomi nasional. Lebih spesifik lagi, apakah setiap *hutang baru* atau "kerjasama" ekonomi dengan negara lain bisa "menyumbang", atau malah "mengancam" ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Contoh yang paling sering menjadi bahan perdebatan hangat adalah mengenai pengambilan kebijaksanaan yang menyangkut *untung rugi* (trade off) antara *pertumbuhan* dan *pemerataan*, yang amat erat berkaitan dengan sila kedua, ketiga dan kelima.

Apabila sila kedua "memerintahkan" peningkatan *kemerataan sosial* secara terus-menerus tanpa mengorbankan pertumbuhan, maka pengambil kebijaksanaan perlu mempertimbangkan berbagai alternatif kebijaksanaan untuk memberikan bobot lebih besar pada kebijaksanaan pemerataan tersebut.

Lalu, bagaimana "keseimbangan" bisa ditentukan dalam praktek atau pelaksanaannya. Misalnya, dewasa ini sudah semakin banyak ditemukan data yang menunjukkan keberhasilan program-program pemerataan khususnya di Pulau Jawa, meskipun rupanya belum terjadi di luar Jawa. Bersamaan dengan itu timbul masalah baru berupa semakin senjangnya kemakmuran antara Jawa dan luar Jawa dan antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur.

Sebagai catatan, pulau-pulau luar Jawa, khususnya Sumatera yang dulu lebih makmur dibandingkan Jawa, kini semakin dilampaui oleh Jawa. Data *Susenas* dari BPS misalnya menunjukkan bahwa pada tahun 1970 pendapatan penduduk Jawa 35% di bawah pendapatan rata-rata penduduk luar Jawa. Tetapi perbandingannya 17 tahun kemudian, berbalik, kini justru

pendapatan penduduk luar Jawa 20% di bawah rata-rata pendapatan penduduk Jawa. Maka kembali terlihat bahwa pembangunan ber-Pelita yang berpedoman pada satu perencanaan sentral ternyata belum mampu mewujudkan *Keadilan Sosial* bagi penduduk seluruh wilayah Indonesia.

Dengan data-data empirik itu bisa kita lihat bahwa "aturan main" ekonomi Pancasila dengan lima silanya tidak saja menghadapi tantangan dalam "disiplin" penerapannya, tetapi sifat tantangannya itu sendiri bisa berubah dari waktu ke waktu, karena itu diperlukan kewaspadaan terus-menerus dalam menjaga ketepatan pelaksanaannya.

Masalah-masalah demikian timbul, menurut Mubyarto, nampaknya disebabkan antara lain oleh tiga sebab pokok yaitu: (1) masih adanya peninggalan sistem budaya feodal, (2) kemajemukan bangsa, dan (3) geografi Indonesia yang menyebar amat luas dari Sabang sampai Merauke. Pancasila, Etika Ekonomi, dan Dunia Bisnis.

Selanjutnya dalam buku BP7-Pusat (1991), Mubyarto menuliskan karena sifat moralistik ekonomi Indonesia; maka ekonomi Indonesia lebih menonjol sebagai ekonomi moral, dan bukan ekonomi yang terlalu rasional. Hal ini pernah dikaitkan pula dengan fenomena menurunnya efisiensi Indonesia, khususnya pada periode ekonomi *bonansa* minyak 1973-1980. Pada periode itulah efisiensi ekonomi nasional dan produktivitas amat menurun terutama karena menurunnya efisiensi sektor industri yang turun dari 2,12 pada tahun 1975, menjadi 0,49 pada tahun 1980.

Kemudian penurunan efisiensi industri ini dapat dibaca bersumber sangat jelas pada proteksi yang berlebihan (misalnya untuk industri tekstil 192% dan industri kendaraan bermotor 718% pada tahun 1980). Sumber kedua dari *inefisiensi* adalah bentuk pasar yang monopolistik. Efisiensi Industri yang rendah akibat proteksi dan berkembangnya praktek monopoli kemudian menjadi "beban ekonomi" yang berat, terutama pada waktu kita harus mulai mengalihkan pasar barang-barang manufaktur dari pasar domestik ke pasar ekspor, yaitu sesudah penerimaan devisa kita jatuh akibat merosotnya harga minyak bumi di pasar dunia.*

Pandangan Mubyarto mengenai sikap toleransi bangsa Indonesia terhadap sistem dan cara kerja yang tidak efisien perlu mendapat telaah yang mendalam. Sebagai pembanding, Adam Smith menganggap bahwa kebebasan manusia mengikuti pasar akan meningkatkan efisiensi, atau mendorong sikap efisien dari manusia. Pertanyaannya adalah, apakah sikap inefisiensi dari bangsa ini muncul karena mereka belum berada dalam situasi manusia bebas seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith. Secara lengkap, pandangan Mubyarto adalah: "Toleransi bangsa Indonesia terhadap sistem dan cara kerja yang tidak efisien, nampaknya sudah merupakan bagian dari sistem nilai bangsa yang sudah berjalan lama".

Konsekuensinya, hal ini berarti memperkuat toleransi atas berkembangnya "sistem" ekonomi biaya tinggi, yang juga merupakan akibat tidak langsung dari praktek-praktek korupsi diberbagai sektor ekonomi kita.

Toleransi kita terhadap inefisiensi barangkali didasarkan pada pengalaman bahwa memang bangsa Indonesia mampu bertahan bertahun-tahun, meskipun ekonomi berjalan tidak efisien. Tetapi

sebaiknya dirasakan pula bahwa gejolak-gejolak masyarakat muda muncul kepermukaan jika masyarakat mulai merasakan ancaman-ancaman terhadap keadilan.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa dalam ekonomi Pancasila yang menjunjung tinggi azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat, rupanya apabila harus memilih antara keadilan sosial dan efisiensi, kita akan cenderung lebih mengorbankan efisiensi. Efisiensi lawan keadilan sosial rupanya analog dengan *dilema* antara pertumbuhan dan pemerataan. Masyarakat Indonesia cukup cepat bereaksi menginginkan pemerataan pada waktu Pelita I berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian ternyata diikuti meningkatnya ketimpangan ekonomi secara mencolok.

Pertanyaan lain adalah dapatkah kita secara lebih konkrit mengamati bekerjanya ekonomi moral dalam praktek hidup sehari-hari? Dua peneliti dari Universitas Nasional Australia (ANU) pernah menghitung transfer pendapatan neto (nett transfer Income) dari sepuluh desil (klas) pendapatan keluarga. Dengan

menggunakan data-data Susenas di DIY 1981 ditemukan 2 (dua) kesimpulan yang menarik sebagai berikut:

Pertama, keluarga-keluarga di kota rata-rata menerima transfer pendapatan yang jauh lebih besar dibanding rata-rata keluarga di desa (17% di kota dibanding 2,7% di desa dari pendapatan total pertahun).

Kedua, keluarga-keluarga berpendapatan tinggi rata-rata menerima pendapatan transfer neto positif lebih besar dibanding rata-rata keluarga berpendapatan rendah (miskin). Dan fenomena ini nampak tidak berbeda di kota maupun di desa. Semakin kaya seseorang ternyata secara neto ia lebih banyak "menerima" daripada "memberi". Dan sebaliknya semakin miskin seseorang ternyata ia secara neto setiap tahunnya lebih memberi daripada menerima.

Penemuan peneliti lain yang nampaknya sejalan dengan data-data tersebut telah kami diskusikan dengan para pejabat pemerintah daerah Propinsi Riau. Data-data pendapatan nelayan di sana meskipun relatif tinggi dibandingkan pendapatan rata-rata

nelayan di Jawa, namun termasuk salah satu yang terendah dalam masyarakat Riau. Pendapatan yang rendah ini antara lain disebabkan oleh adanya berbagai pungutan (baik resmi maupun tidak resmi). Seandainya pungutan-pungutan tersebut hilang, satu hal yang hampir mustahil, maka pendapatan mereka bisa lebih meningkat menjadi 5 atau 10 kali lebih besar.

Sebenarnya fenomena ini bukanlah hal baru dalam perekonomian pedesaan kita. Kurang berkembangnya ekonomi komoditi perkebunan rakyat seperti karet, kelapa dan kini cengkeh dan kopi juga, antara lain disebabkan terlalu banyaknya "pungutan" atas penerimaan petani, untuk karet misalnya, petani hanya menerima paling banyak 40% dari harga *FOB*. Harga yang rendah dan tidak adanya perangsang untuk meningkatkan mutu hasil produksi petani, tidak memberikan gairah bagi upaya peningkatan produksi. Oleh karena itu dalam hal karet rakyat sistem PIR BUN yang dikenalkan pemerintah sejak 1977 ditujukan secara langsung untuk meningkatkan penerimaan petani karet menjadi paling sedikit 70% dari harga *FOB*.

Demikian kiranya jelas bahwa ekonomi moral yang tidak semata-mata rasional itu harus kita akui sudah cukup melekat pada sistem nilai dan budaya Bangsa Indonesia. Meskipun kita secara terbuka ingin mengikis habis sifat-sifat irrasional yang tercermin dalam efisiensi dan produktivitas yang rendah dalam perekonomian kita, toh pada akhirnya kita menghadapi “tantangan” berupa moral ekonomi bangsa yang tidak sepenuhnya bersifat negatif. Sebaliknya dalam hati nurani kita sebagai bangsa masih selalu terselip perasaan was-was, jangankan pengambilan pilihan semata-mata yang rasional justru akan merugikan dalam jangka panjang dan justru akhirnya akan kita sesali.*

4.2. Beberapa Pandangan tentang Persoalan Sistem Perekonomian Indonesia

Seperti telah diketahui, dalam melaksanakan sistem ekonomi usaha bersama berdasar azas kekeluargaan, Indonesia mengenal tiga pelaku utama yaitu koperasi, usaha negara dan usaha swasta. Dari segi pandangan disiplin nasional yang harus atau

wajib dipatuhi, kita bisa menyatakan bahwa masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai etika kerja sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan organisasi atau perkumpulan orang (bukan perkumpulan modal) yang dibentuk oleh para anggotanya untuk melayani kepentingan mereka, yaitu membantu memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Ini berarti *misi* dan *etika kerja* (perkumpulan) koperasi adalah pelayanan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kepada anggotanya. Sehingga ukuran paling mendasar untuk menilai berhasil tidaknya koperasi adalah *manfaat pelayanan* kepada anggota. Ditinjau dari segi ini maka keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) adalah sekunder. Namun seandainya SHU tadi tidak ada pada akhir tahun buku, tetapi selama tahun yang bersangkutan setiap anggota koperasi sudah merasa kepentingannya *dilayani* dan *diperjuangkan* oleh perkumpulan koperasi, sehingga kesejahteraan mereka benar-benar meningkat, maka bisa dikatakan bahwa misi koperasi telah berhasil. Misalnya anggota KUD peternak sapi perah sudah akan

menganggap KUD berhasil, apabila secara teratur memasarkan hasil produksi susu para peternak, sukur dengan harga yang selalu bertambah baik, yang mengakibatkan kenaikan *pendapatan dan kesejahteraan anggota*.

Etika ekonomi **usaha negara** hampir sama dengan etika ekonomi (perkumpulan) koperasi yaitu *melayani* tetapi sekaligus melindungi kepentingan umum. Orientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan umum inilah misi utama usaha negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Inilah yang terkandung dalam pengertian "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak", yang harus dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal (sebesar-besar kemakmuran rakyat).

Dalam pada itu **usaha swasta** yang memperoleh kesempatan luas dalam perekonomian Indonesia yang menganut sistem pasar, berfungsi sebagai wadah pemupukan modal. Pemupukan modal hanya bisa dicapai melalui pemupukan keuntungan usaha dari waktu ke waktu (reinvestasi). Oleh sebab itu setiap usaha swasta harus mengejar keuntungan. Inilah misi atau etika kerja

usaha swasta secara sempit. Usaha swasta harus dan wajib memperoleh keuntungan (laba) dari usahanya dan laba itulah perangsang usahanya. Etika ekonomi usaha swasta adalah memproduksi dan menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat, dengan mengambil keuntungan uang dari kegiatan usahanya itu. Usaha swasta berkembang karena ada keuntungan yang bisa diperoleh dan dipupuk.*

A. Beberapa Persoalan

Koperasi di Indonesia pada saat ini kurang menyadari atau kurang mampu mengaktualisasikan kesadaran akan usaha bersama dari para anggota sebagai inti dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup bersama sehari-hari. Dalam pengertian tersebut di Indonesia pada dasarnya Koperasi bukanlah pertama-tama membutuhkan modal bersama, melainkan usaha bersama. Kadangkala terjadi bahwa perlakuan khusus yang bermaksud membantu, namun dengan cara yang salah justru berdampak negatif yang tidak mendewasakan, sehingga

pada akhirnya justru tidak mengembangkan potensi koperasi sendiri.

Koperasi tengah disorot tajam sekarang ini terlebih setelah memperoleh *kesempatan* "membeli" saham dari swasta. Kiranya hampir semua pengurus Koperasi dan kebanyakan anggota masyarakat akan menerima baik uluran tangan pemerintah yang memungkinkan Koperasi boleh "membeli" saham, sebab masalah modal (dana) yang selama ini sering menghambat maju dan berkembangnya Koperasi, diharapkan akan dapat mulai teratasi.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat telah didorong, dibina dan ditumbuh-kembangkan dalam rangka mewujudkan demokrasi Ekonomi. Pemerintah beranggapan bahwa kegagalan Koperasi memenuhi maksud yang terkandung di dalam UUD 1945 merupakan kegagalan bangsa, dan Koperasi dapat mencakup semua tingkat dan jenis usaha dalam masyarakat. Oleh karena itu harus diperhatikan sejumlah kendala yang menyangkut, antara lain kecenderungan dijadikannya koperasi sebagai *sapi perahan* bagi para pejabat ataupun mitra swastanya, kekurangan dalam bidang manajemen termasuk mutu profesionalisme, kualitas

kepengurusannya, dan yang terkait dengan keanggotaannya (pendidikan pada umumnya masih rendah).

B. Sektor Negara

Disisi lain perlu pula ditinjau perkembangan sektor negara atau perusahaan-perusahaan yang dikuasai dimiliki oleh negara yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada masa Orde Lama, terutama kurun waktu 1960-1965, ekonomi Indonesia amat banyak dipengaruhi sistem ekonomi sosialis dengan nama: **Ekonomi Terpimpin**. Nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 50-an lebih mendorong Indonesia memasuki apa yang disebut sebagai ekonomi terpimpin di bawah pengaruh ideologi sosialisme.

Sejak saat itulah lahir Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sekaligus melahirkan pula apa yang disebut *monopoli*. Pemerintah Indonesia juga telah menasionalisasikan perusahaan-perusahaan besar yang mendorong terjadinya monopoli.. *

Dalam perkembangannya, ternyata dengan langkah tersebut pemerintah Indonesia telah terseret ke dalam lingkaran setan mengenai pemilikan, subsidi, keputusan-keputusan dengan dasar lemah, investasi-investasi yang merugi, dan pembengkakan subsidi. Selanjutnya Pemerintah secara berangsur-angsur tampak mulai menyadari bahwa dengan memiliki dan memimpin industri berarti harus selalu mengkompromikan tugas pokoknya.

Pemerintah harus menjadi wasit bagi persengketaan-persengketaan, yang tidak jarang gagal mencapai kesepakatan antara industri, perusahaan dan perorangan. Pemerintah harus menjadi penegak hukum dan sekali gus menjadi wasit dalam persengketaan perjanjian. Adalah tugas pemerintah untuk menetapkan kerangka kerja yang dapat menumbuh-suburkan perdagangan bebas dalam masyarakatnya. Pemerintah harus menurunkan undang-undang perjanjian, melindungi rakyat dari pencurian atau kekerasan, dan melindungi pemilikan, menjamin bahwa undang-undang diberlakukan sebagaimana mestinya dan membuat peraturan, mengubah undang-undang, atau ketetapan lainnya melalui perdebatan bebas untuk menyesuaikan

perdagangan dan kondisi persaingan dengan keadaan yang berubah-ubah. Sangat sulit untuk melaksanakan peran ini dengan adil apabila pada waktu yang bersamaan pemerintah harus bertindak sebagai pemilik sekaligus manager dalam seluruh rangkaian kekayaan tersebut.

Penyelenggaraan dan pengaturan pasar oleh Pemerintah seperti dilakukan oleh Indonesia tentunya bertentangan dengan tuntutan kebebasan yang dianjurkan oleh Adam Smith. Dalam situasi semacam itulah terjadi *khaos* dan campur aduk sistem pemilikan oleh individu dan pengaturan pasar oleh pemerintah.

Selain itu Pemerintah sebagai pemilik BUMN, bagaimana menghadapi kontradiksi sebagai berikut: Bagaimana pemerintah dapat mempertimbangkan perlakuannya secara adil terhadap semua pesaing sektor swasta dalam menetapkan batas keuntungan perusahaan negara pada saat perusahaan negara tersebut berada dalam tekanan keuangan, sedangkan pemerintah sendiri tidak mempunyai uang lagi untuk mensubsidinya? Bagaimana pemerintah dapat mewakili kepentingan pesaing sektor swasta dengan baik jika semua informasi dan sebagian

besar tekanan terhadapnya datang dari perusahaan negara yang banyak dirugikan oleh pesaing swasta yang sukses? Bagaimana pemerintah dapat mempertimbangkan dengan adil kebijakan ekonomi mengenai tarif, subsidi, atau campur tangan lainnya jika pemerintah sendiri merupakan pemilik sejumlah besar modal yang terkena akibat kebijakan tersebut, dan jika pemerintah terus-menerus terpengaruh oleh perusahaan negara yang dijalankannya? Hal ini dan sejumlah kesulitan lainnya timbul karena pemerintah sekaligus mencampuradukkan peranannya sebagai wasit dan pemilik, direktur dan manager.

Di atas layar yang lebih lebar kita sekarang telah dapat melihat bahwa **Marxisme** untuk sementara ini mengalami kemunduran melalui perubahan-perubahan, terutama dalam memulihkan mekanisme harga dan perusahaan bebas. Hal ini bukannya tidak menjadi perhatian oleh Indonesia seperti negara sedang berkembang, lainnya..

Empat puluh tahun silam Indonesia mungkin terpengaruh oleh kepercayaan bahwa negara yang tersentralisasikan kokoh dapat menyalurkan barang-barang dengan lebih baik dan lebih cepat dan bahwa kebebasan yang hilang, jika hal ini merupakan harga

yang harus dibayar, tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan keuntungannya. Baru pada tahun 1965 para tokoh Ekonomi sadar akan segudang kegagalan ekonomi Marxis dan kontradiksi yang melekat pada dirinya. Ketika itu sudah jelas kelihatan bahwa negara bukannya membebaskan rakyat dan memberikan kedaulatan kepada rakyat dengan cara yang dibayangkan oleh kaum Marxis, malahan melakukan penguasaan dan mengambalihkan kedaulatan melalui birokrasi. Peranan negara bukan semakin hilang, melainkan semakin menguasai masyarakat, melalui aparat birokrasi dan dengan serangkaian lembaga dan pengawasan negara, sehingga tugas untuk menghidupi kehidupan yang utuh dan bebas jauh lebih sulit. Demikianlah situasi perekonomian di jaman Orde Lama. Praktek penguasaan semacam itu ternyata masih menarik selera penguasa yang kemudian, kali ini di dalam naungan semboyan stabilitas

Menurut Marx, kontradiksi yang terkandung dalam kapitalisme akan menyebabkan sistem tersebut ambruk. Dan di dunia ini masih ada orang-orang yang menunggu saat kontradiksi tersebut cepat membesar, sehingga masyarakat Kapitalis Barat akan jatuh ke dalam keadaan yang gawat. Pada saat terjadi kemerosotan

GNP kegoncangan perdagangan, kenaikan tingkat inflasi atau runtuhnya bursa efek, kaum Marxis akan mendongakkan kepala mereka ke langit dan mengatakan bahwa akhirnya dunia yang dijanjikan akan lahir sambil menunggu kegagalan kapitalisme, dan menyambut dengan gembira setiap pertanda bahwa sistem kapitalis untuk sementara gagal memperbesar kemakmuran.

Hingga saat ini-pun masih banyak orang lain di dunia yang menerima alternatif nyata yang ditawarkan komunisme yang menjanjikan negeri susu dan madu dan begitu juga dengan janji melapuknya negara, dengan rakyat memiliki hak pilih dan berkuasa sebagai warga negara, memiliki pilihan yang nyata dan kemakmuran yang meningkat. Mereka sedang dicekoki dengan falsafah *utilitarianisme-egalitarian* yang tidak menarik dan membosankan. Tunduk kepada birokrasi dan aparat partai yang sangat kuat, dan terpaksa hidup jauh di bawah standar kehidupan Dunia Barat yang bebas. Ironi yang menonjol adalah walaupun Marxisme telah memberikan persamaan derajat yang luas bagi sebagian besar orang dalam masyarakat, dengan mengorbankan kelayakan standar hidup, paham itu telah sangat menyimpang karena orang telah menggunakan Partai dan aparat birokrasi

untuk mendapatkan hak-hak istimewa dalam beroleh barang-barang dan jasa-jasa yang tidak dapat diperoleh orang lain dengan kasih dan uang.*

Kontradiksi yang melekat pada Marxisme selalu lebih mencolok daripada kontradiksi yang dianggap Marx bahwa ada masanya ketika sistem kapitalis dapat menimbulkan krisis keuangan dan produksi. Ada masanya ketika orang terlalu banyak memproduksi barang-barang yang sama. Akan tetapi kapitalisme mempunyai cara untuk meng-hadapinya. Sebagaimana telah kita lihat sebelumnya, mekanisme harga, dalam jangka menengah, akan menye-lesaikan masalah ini. Hal ini berbeda dengan Marxisme, yang jika perencanaan negara salah tidak ada sesuatu pun yang dapat menghentikan kesalahan itu kecuali jika aparat partai membentuk organisasi canggih yang baru, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membatasi kesalahan produksi sampai proses birokratis dan politis memutuskan untuk mengubah pikirannya. Kontradiksi yang melekat pada Marxisme banyak sekali. Kelebihan dan kekurangan produksi mungkin sekali terjadi

Dalam sistem ekonomi terpimpin, kesalahan distribusi sumber daya antara persenjataan dan barang-barang konsumsi dan investasi, terlihat jelas. Semakin jelas, di bawah sistem itu rakyat dijauhkan dari politik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada golongan miskin pekerja.

Tampak nyata bahwa cita-cita egalitarian hancur di bawah tekanan-tekanan yang biasa dilakukan oleh sikap pilih kasih dari orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, tampak ternyata. *

Lahirnya Orde Baru sebenarnya merupakan perkembangan dan arah baru dari sistem ekonomi Indonesia. Watak bangsa Indonesia yang tidak mengingini kejutan dan patahan di dalam gerak sosialnya, selalu mencoba menerangkan bahwa Orde Baru merupakan kelanjutan dari jaman sebelumnya (di kenal dengan Orde Lama). Pembangunan Ekonomi di dalam Orde Baru dilaksanakan dengan sistematis dan berencana di bawah bantuan keuangan negara-negara donor.

Apa yang menonjol di dalam pembangunan ideologi Orde Baru? Ideologi Orde Baru tidak berubah, tetapi memegang teguh ideologi Pancasila.

Pembangunan ekonomi di bawah ideologi Pancasila Orde Baru semakin menempatkan pandangan Adam Smith pada kedudukan yang lebih terhormat, artinya lebih memberikan peran kebebasan pada pasar, dengan arti lain lebih menjunjung tinggi mekanisme pasar.

Seperti telah diuraikan berulang-kali, *mekanisme pasar* adalah instrumen raksasa yang merupakan "invisible hands" guna melakukan alokasi faktor-faktor produksi yang optimal. Dengan demikian juga alokasi pendapatan yang optimal. Kecuali bahwa mekanisme pasar mengatur alokasi faktor-faktor produksi, mekanisme pasar juga mengandung prasyarat kebebasan para konsumen berkonsumsi. Justru perilaku para konsumen dengan preferensinya inilah, yang dinyatakan dengan niatnya untuk membeli barang dan jasa yang disukainya beserta harga yang bersedia dibayarnya, merupakan isyarat-isyarat dan signal-signal yang lues. Dengan kebebasan berproduksi dan berdistribusi oleh

siapapun, dan dengan kebebasan para konsumen menentukan pilihannya beserta persyaratan harganya dalam berkonsumsi, produsen dan konsumen bertemu di pasar, lengkap dengan mekanisme permintaan dan penawaran. Interaksi kekuatan permintaan dan penawaran dan membentuk harga. Harga menjadi signal dan isyarat-isyarat lagi, yang menuntun dan menggiring proses produksi dan konsumsi sedemikian rupa, sehingga alokasi faktor-faktor produksi dan alokasi pendapatan menjadi optimal.

Benarkah kesemuanya ini? Benar kalau semua bentuk pasar adalah pasar dengan "perfect competition", kalau tidak ada satupun orang yang tidak mendikte pasar dengan secara sepihak mengurangu kualitas barangnya atau secara sepihak menaikkan harga barangnya tanpa diancam segera disaingi oleh pesaing lainnya. Dengan kata lain, skenario di atas hanya mungkin di dalam dunia khayalannya Adam Smith. Jelekkah dunia khayalan Adam Smith, dan apakah tidak ada validitasnya? Tidak. Dunia Adam Smith adalah dunia yang indah, dunia yang adil dan dunia yang selalu akan mencapai keseimbangan. Mekanisme Adam Smith, kalau seandainya semua persyaratannya memang bisa

dipenuhi, memang valid. Sayangnya, dunia yang demikian tidak pernah ada, dan tidak akan ada. Tetapi indahnyanya, adilnya, keseimbangannya, mekanisme kita akui. Maka haruslah kita dekati dengan berbagai peraturan dan pengaturan. Jadi tidak dengan deregulasi dan debirokratisasi dalam arti sempit yang sifatnya bubar-bubaran dan *nihilistik*.

Mengapa dunianya Adam Smith tidak pernah ada? Karena Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan berkreasi dan berinovasi. Karena itu, barang dan jasa yang tadinya homogen tulen dibuatnya berbeda. Garam yang pada hakekatnya adalah barang homogen ditambah dengan berbagai mineral, dibungkus dengan kemasan yang indah, diberi merk dan diberi etiket yang menarik. Keseluruhannya lalu didaftarkan sebagai paten yang tidak boleh ditiru. Garam yang demikian diiklankan dan dipromosikan sebagai yang lebih baik dari garam yang lain. Maka mulailah terbentuk clientele, kelompok langganan yang percaya, yakin dan setia pada garamnya. Pasar yang tadinya homogen dan bentuk persaingannya adalah persaingan sempurna atau perfect competition, yang tadinya atomistik, berubah menjadi persaingan yang oligopolistik. Pasar menjadi pasar yang

tersegmentasi. Masing-masing produsen mempunyai langganannya sendiri-sendiri yang relatif setia. Dalam kelompok ini, produsen mempunyai kedudukan monopolistik. Distorsi terhadap dunianya Adam Smith sudah terjadi. Bolehkah dan baikah? Boleh dan baik, karena yang demikian ini justru merupakan kekayaan beradaban dan kebudayaan manusia, asalkan cara-caranya beriklan dan berpromosi tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung unsur-unsur non-etis lainnya.

Dengan cara-cara bersaing sajalah yang walaupun sudah merupakan distorsi terhadap dunianya Adam Smith tadi ternyata masih kita rasakan sebagai kekayaan peradaban manusia.



BAB V.

PENUTUP

5.1. Rekapitulasi Tesis

Penulis telah mencoba menggambarkan pandangan ekonomi yang diutarakan oleh tokoh-tokoh, terutama para pakar yang sering dianggap sebagai filsuf kaliber dunia. Di kemudian hari pandangan mereka dianut oleh kelompok atau masyarakat sebagai ideologi yang mempengaruhi gaya, cara dan sistem kehidupan ekonomi. Dua tokoh besar yang dapat mewakili aliran yang saling bertentangan yang kemudian hari mempengaruhi

sistem perekonomian bangsa-bangsa di dunia, **Adam Smith** dan **Karl Marx**, secara cukup luas diutarakan dalam tesis ini.

Memang banyak dipercaya, bahwa sistem ekonomi dunia amat dipengaruhi berbagai ragam ideologi, namun dua ideologi besar yaitu liberalisme dan sosialisme yang dapat diambil sebagai tonggak referensi. Dimulai dengan **Adam Smith** yang secara meyakinkan mengutarakan dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" bahwa kebebasan manusia akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Secara mendasar Adam Smith menandakan bahwa manusia secara alamiah didorong oleh enam pertimbangan motivasi kepentingan diri sendiri ; unsur dalam hubungan antara sesama manusia (dari satu individu terhadap individu-individu lain); hasrat untuk berkelakuan secara bebas; kecenderungan dalam perilaku untuk menjaga sikap sopan santun; kebebasan untuk bekerja; dan kecenderungan dalam dunia modern untuk melakukan transaksi jual-beli barang.

Sebagai akibat kebebasan ini, akan terdapat sikap dan moral sebagai berikut :

- Memperoleh **kapital** atau uang untuk dimiliki perorang-an/secara individual;
- Memperbolehkan penggunaan uang; modal, atau kapital untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dengan motip memperoleh laba;
- Memperbolehkan laba yang ditumpuk terus hingga menjadi kapital yang sangat besar;
- Serta memperbolehkan penggunaan laba yang menjadi kapital itu untuk mendirikan pabrik-pabrik (unit produksi) baru baik yang sejenis maupun yang bidang geraknya berlainan sama sekali.

Akan tetapi, kapitalisme yang tidak dapat dipisahkan dengan mekanisme pasar seperti digambarkan oleh Adam Smith, ternyata tidak otomatis membawa keseimbangan dan keadilan sosial ekonomi seperti yang dibayangkannya. Justru mekanisme pasar yang seharusnya bekerja dengan pengaturan oleh *the invisible hands* (tangan-tangan yang tak terlihat) itu telah lama *didistorsi* dan/atau sengaja diselewengkan oleh produsen yang lebih kuat dengan tujuan untuk produsen yang lebih lemah dan mengeksploitasi konsumen dan buruh. Semua dampak

penyelewengan mekanisme pasar itu telah dialami oleh Inggris selama Revolusi Industri berlangsung (abad ke-17).

Pandangan Soerjanto Poespowardojo dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Indonesia mengatakan: "Dengan penyempitan fungsi rasionalitas menjadi instrumental, maka dalam masyarakat industrial - kapitalistis sejak abad ke-19, terjadilah proses ekonomi pasar yang cenderung berjalan dengan hukum-hukumnya sendiri yang logis rasional menjadi sistem yang otonom, yaitu terlepas dari nilai yang memberikan pemaknaan dan terpisah dari bidang kehidupan lainnya.

Dalam otonomi ekonomi pasar yang kapitalistis itu berlakulah prinsip utama bahwa segala sesuatu harus dikuasai dan dapat dikuasai dengan mereduksinya ke dalam satu keseluruhan barang atau produk yang bisa dimatematisasi, diformalisasi, serta dimanipulasi melalui proses kerja untuk mendapatkan nilai tambah menuju pertumbuhan tanpa perhitungan arti dan maknanya sebagai kriteria internal.

Untuk itulah kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang "mandiri" yang bergerak mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya, melaksanakan akumulasi modal untuk mengkonsentrasikan kekuatan, menjalankan ekspansi usaha ke hulu dan ke hilir dalam bentuk-bentuk yang monopolistis, dilengkapi dengan manajemen yang rasional serta didukung oleh teknologi canggih yang membuat sistem menjadi efektif dan efisien".

Marx bukanlah seorang reaksioner yang bereaksi terhadap ketidakbenaran pandangan Adam Smith. Karl Marx dikenal sebagai penulis tajam yang amat cermat mempelajari pandangan pakar-pakar Ekonomi besar seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Tenaga pendorong proses sejarah yang penuh darah itu dicari Marx dalam produksi untuk bahan kehidupan manusia (makanan, pakaian, rumah dan sebagainya). Karena pemikiran pokoknya adalah: "bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tapi terbalik, keadaan masyarakatlah yang menentukan keadaan manusia". Keadaan ekonomilah yang membentuk basis bagi pikiran (kesadaran), yang tercermin dalam bentuk budaya, hukum, moral, agama, dan sebagainya. Salah satu dari tingkat manusia yang terbesar menurut Marx, adalah pembagian kerja.

Pembagian kerja memungkinkan manusia untuk membuat lebih banyak barang daripada yang dibutuhkan untuk hidup saja. Dari sini terjadi kekayaan, yang sebenarnya untuk memperbaiki kehidupan seluruh umat manusia. Bersama itu juga pembagian kerja menjadi persyaratan bagi "penghisapan". Sebagian dari masyarakat hidup dari hasil produksi yang dibuat oleh sebagian dari masyarakat yang lain, yang produksi lebih banyak daripada hanya untuk mempertahankan eksistensinya saja.

Sejak itulah manusia terbagi dalam kelas-kelas. Bagi filsuf ini, sejarah dunia tidak lain hanyalah perjuangan kelas dari masyarakat perbudakan kemasyarakat feodal, dengan hamba sahaya dan hamba taninya, sampai kekapitalisme dengan kaum buruh yang tergantung pada upah. Dalam perjuangan kelas ini, yang tertindas dapat mengubah bentuk penghisapan, tetapi tidak dapat menghilangkan penghisapan itu sendiri. Kemajuan teknik serta perluasan perdagangan begitu juga perbaikan sistem keuangan membuat tatanan ekonomi berjuis dapat mendesak tatanan ekonomi feodal dari abad pertengahan, yang sebagian besar berlandaskan pada pertanian. Kekayaan dan kekuasaan ekonomi berpindah dari kaum bangsawan ke kaum birjois. Hasil yang

terpenting dari perubahan ini: sejak saat itu di atas panggung sejarah dunia buruh berhadapan dengan kaum pemilik kapital. Dan pertarungan mereka, kata Marx, merupakan pertarungan terakhir. Setelah itu tujuan sejarah akan menjadi kenyataan, yaitu masyarakat tanpa kelas, yang dalam masyarakat tersebut alat produksi dimiliki oleh seluruh umat manusia.

Untuk memberi dasar kepada filsafat secara ini, Marx harus mendirikan tiang kedua, ia harus membuktikan bahwa kapitalisme akan tenggelam karena pertentangan-pertentangan yang terdapat dalam dirinya sendiri seperti juga tenggelamnya ekonomi feodal sebelumnya. Hal ini ia lakukan dengan cara membuat kritik ekonomi.

Menurut Marx seorang buruh itu bebas. Artinya, buruh itu bebas (terpisah) dari alat dan mesin-mesin yang bukan miliknya. Satu-satunya barang yang menjadi miliknya adalah tenaga kerjanya. Selain itu dalam pengertian hukum borjuis ia bebas. Ia berhadapan dengan pembeli tenaga kerjanya (pemilik kapital) sebagai seorang partner yang sama tingginya secara hukum, dan

dengan menjual tenaga kerjanya itu memiliki tuntutan yang legitim akan pembayaran uang.

Kapital itu lebih daripada hanya kekayaan saja yang terlihat dari peranannya sebagai uang dalam sirkulasi barang. Pada produksi barang biasa yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan laba seperti di abad pertengahan, petani dan tukang membuat barang hanya untuk ditukar. Tujuan akhir pembuatan barang tersebut adalah membeli barang lain dengan uang yang menjadi perantaranya. Rumus untuk memproses ini berbunyi **barang - uang - barang**.

Sebaliknya dalam kapitalisme, uang diinvestasikan sebagai kapital untuk membeli mesin-mesin, bahan mentah dan tenaga kerja, agar dapat mengubah barang yang telah dihasilkan menjadi uang kembali. Dan uang yang masuk kembali itu harus kembali lebih banyak dari uang yang dikeluarkan. Uang lebih atau nilai lebih ini adalah tujuan akhir dari pemakai modal. Rumusnya berbunyi : **Uang - barang - uang**. Sekarang barang merupakan alat penolong sehingga perputaran kapital serta penghasilan laba tetap dapat berjalan. Menurut Marx, yang

nomor satu dalam ekonomi borjuis adalah pemakaian kapital sebaik mungkin dan bukan memproduksi barang yang dapat memuaskan kebutuhan manusia lain.

Pada produksi barang sederhana, dimana tukang memiliki alat dan sebagai produsen berlaku juga sebagai penjual, tidak dapat terjadi sebuah laba. Alasannya adalah hukum nilai, yang mengatur bahwa dalam pembelian dalam penjualan barang selalu menjadi tukar-menukar jumlah kerjasama yang sama. Jika seorang penjahit menjual celana, yang dibuatnya dalam lima jam, seharga enam jam kerja, maka ia mendapat keuntungan dengan nilai satu jam kerja, tetapi itu tidak banyak. Karena bersama itu jika si penjahit muncul sebagai pembeli misalnya sepatu. Si tukang sepatu dalam membeli celana merasa dirugikan sehingga langsung menyesuaikan harga sepatunya setinggi harga celana. Dengan demikian keuntungan si penjahit hilang dalam membeli sepatu. Hukum tukar-menukar barang memiliki jumlah kerja yang sama berlaku lagi.

Dengan demikian Marx ingin menunjukkan : pada pokoknya nilai lebih tidak akan terjadi karena adanya harga barang yang

dinaikkan, yaitu menjual barang lebih mahal dari nilai tukarnya. Jadi bagaimana terjadi nilai lebih? Jawabnya ditemukan Marx dalam "barang tenaga kerja" yang merupakan "sumber dari nilai". Barang tenaga kerja ini juga harus diproduksi seperti barang-barang lainnya. Melalui makanan, yang dibeli oleh buruh dari upahnya. Sehingga nilai dari barang tenaga kerja sesuai dengan nilai barang yang dibutuhkan buruh untuk hidupnya (termasuk keluarganya).

Timbul pertanyaan : berapa banyak barang yang dibutuhkan oleh seorang buruh untuk menghidupi keluarganya? Apakah hanya makanan, pakaian atau rumah saja? Atau (sekarang) juga sebagai mobil dan liburan ke Spanyol? Ferdinand Lassalle (1825-1864), "pencipta sosial demokrasi Jerman", percaya akan hukum upah yang ditemukan oleh David Ricardo. Yaitu upah berada sedikit di atas batas tingkat eksistensi minimal. Sebaliknya Marx menulis "tidak seperti barang yang lain, penentuan nilai dari tenaga kerja punya elemen sejarah dan moral". Upah tergantung dari "kebiasaan-kebiasaan dan keinginan-keinginan hidup", diantaranya adalah keinginan "membentuk kelas buruh yang bebas". Oleh karena itu, kata si ekonom ini ada gunanya serikat

buruh untuk memperjuangkan nilai daripada barang tenaga kerja (tinggi upah mereka). Walaupun demikian : serikat buruh yang terkuat pun dalam kapitalisme tidak dapat menghindarkan, bahwa nilai dari barang tenaga kerja lebih kecil daripada nilai barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Dan perbedaan antara nilai barang yang dihasilkan oleh buruh dan yang dirampas oleh buruh pemilik kapital dengan nilai barang tenaga kerja yang dibayar dalam bentuk upah, merupakan sumber daripada nilai lebih, yang oleh kaum kapitalis disebut sebagai laba.

Tinjauan historis perkembangan sistem ekonomi dunia, ternyata tidak menggembirakan penganut Marx yang fanatik. Sistem kapitalisme awal dari Merkantilisme berkembang dari Adam Smith hingga kapitalisme sekarang ini menunjukkan fenomena yang tidak sama dengan "logika ilmiah" Karl Marx. Persaingan sempurna dan *invisible hand* dari Adam Smith, berkat kritik yang gencar telah mengembangkan sistem ekonomi baru diberbagai juru dunia maju. Gagasan baru berdasarkan pandangan dasar Adam Smith kini ternyata banyak muncul kembali justru di negara-negara yang menganut landasan Marx, atau ideologi Marxis.

5.2. Rekomendasi

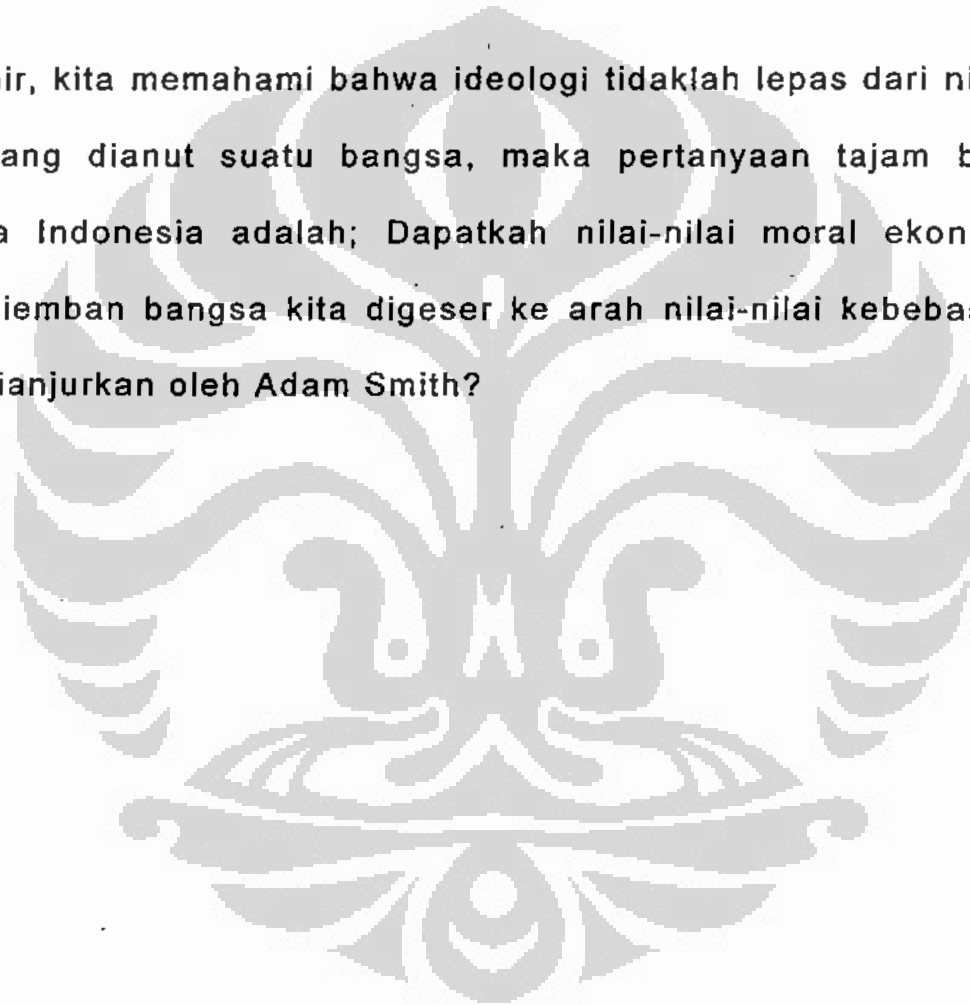
Sebagai rekomendasi, penulis menekankan perlunya diperbincangkan kembali pandangan para pakar ekonomi makro, baik mengenai demokrasi ekonomi maupun mengenai peri kehidupan perekonomian bangsa sesuai dengan ideologi Pancasila.

Banyak pertanyaan penting yang vital bagi peri kehidupan perekonomian bangsa dalam menyongsong masa yang akan datang, satu diantaranya menurut penulis adalah; Apakah benar Sosialisme Indonesia lahir dari religi seperti yang dikatakan oleh Sri Edi Swasono, sebagaimana yang dikutipnya dari tulisan-tulisan Proklamator Dr. Moh. Hatta?

Selain itu, Mubyarto menyatakan bahwa moralitas teori ekonomi Adam Smith adalah kebebasan (liberalisme) dan moralitas teori ekonomi Marx adalah diktator mayoritas kaum proletar, sedangkan moralitas ekonomi Pancasila mencakup seluruh asas Pancasila. Pertanyaan yang tertinggal adalah; Apakah pernyataan itu langsung terkait dengan pernyataannya tentang

moral ekonomi bangsa kita yang isinya adalah; ... Toleransi Bangsa Indonesia terhadap sistem dan cara kerja yang tidak efisien, nampaknya sudah merupakan bagian dari sistem nilai bangsa yang sudah berjalan lama.

Terakhir, kita memahami bahwa ideologi tidaklah lepas dari nilai-nilai yang dianut suatu bangsa, maka pertanyaan tajam bagi Bangsa Indonesia adalah; Dapatkah nilai-nilai moral ekonomi yang diemban bangsa kita digeser ke arah nilai-nilai kebebasan yang dianjurkan oleh Adam Smith?



DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K., Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

Copleston, F., A History of Western Philosophy, London: Search Press, 1963

Darmaputera, Eka, Pancasila Identitas dan Modernitas, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987

Djojohadikusumo, Soemitro, Dasar Teori Ekonomi, Jakarta: Yayasan Obor, 1991

Edwards, Paul, (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, New York: Macmillan, Inc., 1972

Elliot, John E, Comparative Economic Systems, Belmont - USA: Wadsworth Publishing Co, 1985

Giddens, Anthony, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Jakarta: U.I Press, 1986

Havel, Vaclav., (Transl.), Menata Negeri dari Kehancuran, Jakarta: Dian Rakyat dan Yayasan Obor, 1992

Hegel, G.W.F., Hegel and the Human Spirit, translation by Leo Rauch, Detroit: Wayne State Univ. Press, 1983

Koesters, Paul-Heinz., Okonomen Verändern die Welt Stern-Buch in Verlag, Hamburg: 1983

Lenin, V.I., Imperialism, New York: 1977

Lipsey, R.G. et.al., Pengantar Mikroekonomi, Jakarta: Binarupa Aksara, 1991

Mauricedobb, M.A., Studies in The Development of Capitalism, New York: 1963

Oesman, O. dan Alfian (ed.), Pancasila sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991

Poespowardojo, Soerjanto., Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya (Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Filsafat FSUI), Jakarta: 1991

Poespowardojo, S. & K. Bertens, Sekitar Manusia, Jakarta: Gramedia, 1978

Rattansi, Ali, Ideology, Method and Marx, New York:

Russel, Bertrand, History of Western Philosophy, London: Unwin Paperback, 1981

Samuelson, P.A. dan Nordhaus, W.D., Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1993

Sastrapratedja, M. (ed.), Manusia Multi Dimensional, Sebuah Renungan Filsafat (cet. ke-2), Jakarta: Gramedia, 1983

Simatupang, T.B., Pembangunan Nasional sebagai Pengalaman Pancasila: dari Buntut Dalam GBHN 1983 Menjadi Jantung Dalam GBHN 1988, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 1987

Todaro, M. P. dan Abdullah, B., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga, 1991

Winardi DR., Kapitalisme versus Sosialisme, Bandung: Remadja Karya CV, 1986